



PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING

MODEL MANAJEMEN PARTISIPATIF PADA GENERASI MUDA DALAM MENDUKUNG

SUSTAINABILITY INDUSTRI KELAPA SAWIT

Delyana R. Pulungan, S.E.,M.Si
Dina Arfianti Saragih, S.P.,M.Sc

Yulia Windi Tanjung, S.P.,M.Si
Tifany Zia Aznur, S.P.,M.Si
Dr. Suhendri, M.M



PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING

MODEL MANAJEMEN PARTISIPATIF PADA GENERASI MUDA DALAM MENDUKUNG

SUSTAINABILITY INDUSTRI KELAPA SAWIT

Delyana R. Pulungan, S.E.,M.Si
Dina Arfianti Saragih, S.P.,M.Sc

Yulia Windi Tanjung, S.P.,M.Si
Tifany Zia Aznur, S.P.,M.Si
Dr. Suhendri, M.M

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan Karya Ilmiah ilmu pengetahuan;
3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MODEL MANAJEMEN PARTISIPATIF PADA GENERASI MUDA DALAM MENDUKUNG SUSTAINABILITY INDUSTRI KELAPA SAWIT

Penulis

Delyana R. Pulungan, S.E.,M.Si
Dina Arfianti Saragih, S.P.,M.Sc
Yulia Windi Tanjung, S.P.,M.Si
Tiffany Zia Aznur, S.P.,M.Si
Dr. Suhendri, M.M

Penerbit

PT. Radja Intercontinental Publishing



Diterbitkan oleh:

PT. Radja Intercontinental Publishing

**PENERBIT PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING**
(Grup Publikasi RADJA PUBLIKA)

SERTIFIKAT IKAPI



No.032/DIA/2023

Alamat Redaksi:

Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk, Dsn. Angsana,
Kota Lhokseumawe
Telp. 081269223511

Email:

pt.radja.intercontinental.publis@gmail.com

Isi diluar tanggung jawab percetakan
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang
memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan
cara apapun, tanpa ijin tertulis dari penerbit

MODEL MANAJEMEN PARTISIPATIF PADA GENERASI MUDA DALAM MENDUKUNG SUSTAINABILITY INDUSTRI KELAPA SAWIT

ISBN :

978-634-7495-00-6

Penulis :

Delyana R. Pulungan, S.E.,M.Si

Dina Arfianti Saragih, S.P.,M.Sc

Yulia Windi Tanjung, S.P.,M.Si

Tifany Zia Aznur, S.P.,M.Si

Dr. Suhendri, M.M

Editor :

Muhammad Multazam, S.E., M.S.M., CPRM

Penyunting :

Rahmat Idhami, S.Tr.T

Desain sampul dan tata letak:

Rahmat Idhami, S.Tr.t

(Sumber Gambar: Freepik.com)

Tanggal Terbit:

November 2025

Jumlah Halaman :

103

Penerbit:



**PT. Radja Intercontinental
Publishing**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini yang berjudul "Model Manajemen Partisipatif pada Generasi Muda dalam Mendukung Sustainability Industri Kelapa Sawit" dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai kontribusi ilmiah terhadap upaya penguatan peran generasi muda dalam sektor agribisnis strategis, khususnya industri kelapa sawit yang selama ini kerap menghadapi tekanan dari berbagai aspek, baik sosial, lingkungan, maupun ekonomi.

Gagasan penulisan buku ini berangkat dari keprihatinan akan minimnya keterlibatan generasi muda dalam industri kelapa sawit yang berkelanjutan, padahal mereka merupakan kelompok kunci dalam mewujudkan regenerasi petani, inovasi lokal, serta transformasi sosial-ekologis. Melalui pendekatan akademik yang berbasis pada data empiris, teori partisipasi, dan studi lapangan di beberapa wilayah Indonesia, buku ini menawarkan model manajemen partisipatif yang terstruktur, adaptif, dan kontekstual. Model ini tidak hanya membahas tentang pelibatan generasi muda dalam kegiatan teknis, tetapi juga mengangkat pentingnya peran mereka dalam pengambilan keputusan, penguatan kelembagaan, dan pembentukan narasi keberlanjutan dari akar rumput.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para informan di lapangan, rekan peneliti, mitra organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta pemangku kepentingan lokal yang telah memberikan masukan, kritik, dan inspirasi selama proses penelitian dan penulisan berlangsung. Terima kasih khusus juga penulis sampaikan kepada para generasi muda yang telah

menunjukkan semangat, kapasitas, dan komitmen dalam memajukan komunitasnya secara adil dan berkelanjutan.

Harapan besar penulis, buku ini dapat menjadi rujukan tidak hanya bagi kalangan akademik dan praktisi pembangunan, tetapi juga bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas yang ingin mendorong keterlibatan generasi muda secara lebih bermakna dalam industri sawit. Semoga buku ini menjadi bagian dari upaya kolektif dalam membangun sistem tata kelola industri kelapa sawit yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi jangka panjang.

Akhir kata, penulis terbuka terhadap kritik dan saran demi penyempurnaan naskah ini ke depan. Semoga buku ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas, peran, dan pengaruh generasi muda dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Lhokseumawe, November 2025

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Peraturan Hak Cipta.....	ii
Halaman Sampul	iii
Halaman Penerbit	iv
Balik Halaman Judul	v
Alamat Redaksi	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritis	7
Bab III Analisis Partisipasi Generasi Muda dalam Industri Kelapa Sawit	25
Bab IV Model Manajemen Partisipatif untuk Mendukung Sustainability	46
BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi	60
Daftar Pustaka	88
Profil Penulis	91

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia, menyumbang devisa negara secara signifikan serta menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, khususnya di daerah pedesaan (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023). Namun, industri ini kerap dikritik karena berbagai isu keberlanjutan, seperti deforestasi, konflik lahan, dan pelanggaran hak asasi manusia (Greenpeace, 2021). Seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya praktik berkelanjutan, berbagai pemangku kepentingan menuntut transformasi menyeluruh terhadap tata kelola industri ini. Dalam konteks ini, partisipasi aktif generasi muda menjadi kunci untuk mendorong perubahan yang lebih inklusif dan berorientasi jangka panjang.

Generasi muda, sebagai kelompok demografis terbesar di Indonesia, memiliki potensi besar dalam mendorong transformasi industri kelapa sawit melalui inovasi, kepemimpinan sosial, dan pemanfaatan teknologi (Badan Pusat Statistik, 2022). Namun, keterlibatan mereka dalam sektor perkebunan kelapa sawit masih tergolong rendah, baik dalam aspek produksi, pengambilan keputusan, maupun advokasi keberlanjutan (ICRAF, 2021). Banyak di antara mereka memilih sektor informal atau bermigrasi ke perkotaan karena persepsi negatif terhadap industri ini, yang dianggap tidak prospektif dan tidak ramah lingkungan.

Pentingnya model manajemen partisipatif dalam konteks ini terletak pada kemampuannya menciptakan ruang kolaboratif antara generasi muda, pemangku kepentingan industri, dan pemerintah. Pendekatan partisipatif berpotensi memperkuat tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan lokal, serta meningkatkan legitimasi sosial industri kelapa sawit (Ostrom, 2009). Lebih jauh, keterlibatan generasi muda melalui model manajemen partisipatif juga dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi, sekaligus mendorong implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan seperti yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa model pengelolaan yang melibatkan masyarakat, termasuk kelompok muda, memiliki dampak positif terhadap keberhasilan program keberlanjutan di sektor perkebunan (Colchester & Chao, 2013; Larson et al., 2016). Namun demikian, belum banyak kajian yang secara spesifik merancang model partisipatif berbasis generasi muda untuk konteks industri kelapa sawit Indonesia. Hal ini menimbulkan celah dalam praktik kebijakan dan literatur akademik yang perlu segera dijawab melalui riset berbasis data dan pendekatan multidisipliner.

Oleh karena itu, Penulisan buku ini bertujuan untuk mengkaji dan merancang model manajemen partisipatif yang mampu mengoptimalkan peran generasi muda dalam mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit. Dengan memahami motivasi, hambatan, dan potensi keterlibatan

mereka, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi strategis yang aplikatif dan kontekstual.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Penulisan buku ini dirumuskan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara potensi generasi muda dan keterlibatan mereka dalam industri kelapa sawit secara partisipatif. Permasalahan utama yang diangkat adalah:

1. Bagaimana tingkat dan bentuk partisipasi generasi muda dalam industri kelapa sawit saat ini?
2. Apa saja hambatan dan tantangan yang menghalangi keterlibatan generasi muda dalam sektor ini?
3. Bagaimana karakteristik model manajemen partisipatif yang sesuai untuk meningkatkan partisipasi generasi muda?
4. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas implementasi model partisipatif tersebut dalam konteks industri kelapa sawit?
5. Apa saja indikator keberhasilan dari model yang dirancang dalam mendukung keberlanjutan industri?

1.3 Tujuan Penulisan buku

Penulisan buku ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah merancang model manajemen partisipatif berbasis generasi muda dalam mendukung sustainability industri kelapa sawit. Adapun tujuan khusus Penulisan buku ini antara lain:

1. Menganalisis tingkat keterlibatan generasi muda dalam sektor kelapa sawit.
2. Mengidentifikasi motivasi, hambatan, dan persepsi generasi muda terhadap industri kelapa sawit.
3. Merumuskan kerangka model manajemen partisipatif yang kontekstual dan berbasis data.
4. Menilai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi model.
5. Menyusun rekomendasi strategis bagi pemangku kepentingan untuk mendukung peran generasi muda.

1.4 Manfaat Penulisan buku

Penulisan buku ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis. Dari sisi teoritis, Penulisan buku ini memperkaya kajian akademik mengenai partisipasi generasi muda dan manajemen partisipatif dalam industri perkebunan berkelanjutan. Penambahan perspektif generasi muda dapat melengkapi kajian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada petani

dewasa dan korporasi. Dari sisi praktis, Penulisan buku ini dapat digunakan sebagai acuan oleh pemerintah, perusahaan perkebunan, LSM, dan komunitas lokal dalam merancang program pelibatan generasi muda yang lebih inklusif dan produktif.

Secara lebih spesifik, Penulisan buku ini dapat membantu perusahaan kelapa sawit mengidentifikasi potensi tenaga kerja muda yang inovatif, serta merancang pelatihan berbasis kebutuhan dan minat generasi muda. Selain itu, hasil Penulisan buku ini juga dapat digunakan oleh organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat kapasitas advokasi generasi muda terhadap keberlanjutan lingkungan. Dalam jangka panjang, Penulisan buku ini diharapkan mendukung tercapainya SDGs, khususnya tujuan 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) dan tujuan 13 (penanganan perubahan iklim).

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang lingkup Penulisan buku ini difokuskan pada keterlibatan generasi muda berusia 18–35 tahun di wilayah sentra industri kelapa sawit Indonesia, seperti Sumatera dan Kalimantan. Penulisan buku ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang memengaruhi partisipasi generasi muda, tanpa membahas aspek teknis produksi secara mendalam. Model partisipatif yang dirancang berorientasi pada integrasi generasi muda dalam pengambilan keputusan, pelatihan, serta pengembangan usaha berkelanjutan.

Batasan lain dari Penulisan buku ini mencakup keterbatasan data longitudinal, sehingga model yang disusun bersifat prediktif dan perlu divalidasi lebih lanjut dalam implementasi lapangan. Selain itu, fokus utama adalah pada pengembangan model partisipatif dari perspektif sosial dan kebijakan, bukan pada evaluasi dampak ekonomi langsung dari implementasi model.

1.6 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan buku ini terdiri dari enam bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh:

Bab 1 membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

Bab 2 menguraikan kajian literatur dan kerangka teori yang digunakan sebagai dasar konseptual dalam Penulisan buku .

Bab 3 menyajikan temuan tentang kondisi aktual partisipasi generasi muda dalam industri kelapa sawit.

Bab 4 menawarkan rancangan model manajemen partisipatif dan strategi implementasinya dalam mendukung sustainability.

Bab 5 menyimpulkan hasil temuan dan memberikan rekomendasi kebijakan serta saran Penulisan buku lanjutan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

2.1 Konsep Manajemen Partisipatif

Manajemen partisipatif merupakan pendekatan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan individu atau kelompok yang terdampak secara langsung oleh suatu kebijakan atau program. Dalam konteks organisasi, pendekatan ini memberikan ruang kepada seluruh aktor, termasuk pekerja dan komunitas, untuk berkontribusi dalam proses manajemen dan perencanaan strategis (Likert, 1967). Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*), komitmen, dan produktivitas individu terhadap organisasi atau program tertentu (Cotton et al., 1988). Manajemen partisipatif juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah, transparansi, dan kepercayaan antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, pendekatan ini menjadi semakin relevan dalam konteks tata kelola berkelanjutan.

Dalam sektor pembangunan, konsep manajemen partisipatif telah lama digunakan dalam program pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development*). World Bank (1996) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan, terutama di negara berkembang. Keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam implementasi, tetapi juga dalam tahap perencanaan dan evaluasi, menghasilkan hasil yang lebih inklusif dan

relevan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokratisasi pembangunan, yang mendorong keterbukaan dan desentralisasi. Oleh karena itu, manajemen partisipatif dapat diadopsi sebagai model dalam pengelolaan industri strategis seperti kelapa sawit.

Dalam konteks bisnis dan industri, manajemen partisipatif juga diterapkan melalui kolaborasi antara pekerja, manajemen, dan komunitas sekitar. Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, serta memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) (Freeman, 1984). Keterlibatan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan dapat mencegah konflik sosial dan meningkatkan keberlanjutan operasional industri. Selain itu, praktik ini sejalan dengan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) yang kini menjadi standar global dalam investasi berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif menjadi penting dalam pengelolaan industri kelapa sawit yang kerap menghadapi tekanan sosial dan lingkungan.

Manajemen partisipatif dalam sektor perkebunan menghadapi tantangan khusus, seperti struktur kepemilikan lahan, asimetri informasi, dan ketimpangan kekuasaan. Banyak studi menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal seringkali bersifat simbolis dan tidak substantif (Cooke & Kothari, 2001). Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan partisipatif yang otentik dan berbasis kebutuhan lokal, serta memperhatikan konteks sosial budaya. Model yang berhasil adalah model yang

mampu menggabungkan partisipasi horizontal (antar warga) dan vertikal (dengan lembaga pemerintah dan perusahaan). Hal ini relevan dalam upaya membangun legitimasi dan keberlanjutan jangka panjang industri kelapa sawit.

Penerapan manajemen partisipatif juga membutuhkan kapasitas institusional yang memadai, baik di tingkat komunitas maupun lembaga pengelola. Kapasitas ini mencakup keterampilan komunikasi, kepemimpinan, pengorganisasian, dan pemahaman terhadap aspek legal dan administratif. Organisasi lokal yang kuat cenderung lebih mampu terlibat secara aktif dan kritis dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat menjadi elemen penting dalam memperkuat efektivitas model partisipatif (Pretty, 1995). Hal ini juga berlaku dalam konteks keterlibatan generasi muda di sektor kelapa sawit.

Dengan memperhatikan elemen-elemen di atas, manajemen partisipatif dapat diposisikan sebagai pendekatan strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam tata kelola industri kelapa sawit. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hasil ekonomi, tetapi juga pada proses sosial dan politik yang adil. Model yang dirancang dalam Penulisan buku ini akan memanfaatkan prinsip-prinsip tersebut untuk membangun kerangka partisipasi generasi muda. Dengan demikian, partisipasi bukan hanya sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana menuju pembangunan berkelanjutan. Keterlibatan

generasi muda menjadi krusial dalam menjamin keberlanjutan jangka panjang industri tersebut.

2.2 Peran Generasi Muda dalam Pembangunan Berkelanjutan

Generasi muda merupakan kelompok strategis dalam pembangunan karena mereka adalah pewaris masa depan dan agen perubahan. Menurut United Nations (2020), lebih dari setengah populasi dunia berada di bawah usia 30 tahun, dan sebagian besar tinggal di negara berkembang. Di Indonesia, proporsi pemuda (15–34 tahun) mencapai lebih dari 34% dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2022). Jumlah ini menempatkan pemuda dalam posisi penting dalam merancang masa depan bangsa, termasuk dalam sektor-sektor strategis seperti pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, keterlibatan generasi muda dalam pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang tak terelakkan.

Keterlibatan generasi muda dapat mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam bidang iklim, inovasi, dan kerja layak. Generasi muda memiliki karakteristik adaptif terhadap perubahan, terbuka terhadap teknologi, dan memiliki semangat kolaboratif yang tinggi (ILO, 2020). Keterlibatan mereka dalam praktik berkelanjutan, seperti pertanian organik, konservasi, dan energi terbarukan, telah terbukti berdampak positif di berbagai wilayah. Di sektor kelapa sawit, partisipasi pemuda dapat memperkenalkan pendekatan baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Namun demikian, minimnya program yang dirancang secara spesifik untuk menjangkau pemuda menjadi tantangan tersendiri.

Banyak pemuda di pedesaan memilih meninggalkan sektor perkebunan karena persepsi bahwa sektor ini kotor, tidak bergengsi, dan kurang menjanjikan secara ekonomi. Hal ini diperkuat oleh kurangnya pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini (FAO, 2021). Selain itu, struktur agraria yang timpang dan rendahnya akses terhadap modal membuat pemuda kesulitan masuk dalam sektor ini sebagai pelaku utama. Keadaan ini menyebabkan terjadinya kesenjangan generasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan strategi baru untuk menarik dan mempertahankan generasi muda dalam sektor kelapa sawit secara berkelanjutan.

Berbagai organisasi internasional, seperti FAO dan IFAD, telah mengembangkan program untuk meningkatkan keterlibatan pemuda dalam pertanian berkelanjutan. Program-program ini meliputi pelatihan kewirausahaan, pendampingan teknis, dan pembentukan jaringan pemuda tani. Di Indonesia, beberapa inisiatif lokal seperti petani milenial dan agrosociopreneur telah mulai muncul, meski belum merata dan bersifat sektoral. Penguatan kapasitas dan jaringan sosial menjadi kunci keberhasilan keterlibatan pemuda dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Industri kelapa sawit dapat

mengadopsi pendekatan serupa dengan memperhatikan konteks lokal dan kebutuhan pemuda.

Selain faktor ekonomi, nilai dan identitas juga memengaruhi keterlibatan pemuda dalam isu keberlanjutan. Penulisan buku menunjukkan bahwa pemuda yang memiliki kesadaran lingkungan tinggi lebih cenderung terlibat dalam aktivitas konservasi dan advokasi kebijakan (Gonzalez et al., 2022). Dalam konteks ini, pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pelestarian lingkungan dapat menarik minat pemuda. Oleh karena itu, strategi pelibatan pemuda perlu mencakup dimensi nilai, bukan sekadar manfaat ekonomi. Integrasi nilai keberlanjutan ke dalam pendidikan formal dan informal menjadi strategi jangka panjang yang efektif.

Dengan potensi dan karakteristik unik yang dimiliki, generasi muda dapat menjadi motor penggerak transisi menuju industri kelapa sawit yang lebih berkelanjutan. Partisipasi mereka harus difasilitasi melalui kebijakan yang inklusif, program pelatihan yang kontekstual, dan ruang partisipatif yang terbuka. Dalam hal ini, model manajemen partisipatif yang dirancang dalam Penulisan buku ini bertujuan menciptakan ekosistem yang mendukung keterlibatan aktif pemuda. Dengan demikian, keberlanjutan tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga praktik yang ditopang oleh generasi masa depan. Perubahan paradigma dalam pelibatan pemuda menjadi kunci keberhasilan transformasi sektor ini.

2.3 Prinsip-Prinsip Sustainability dalam Industri Kelapa Sawit

Sustainability atau keberlanjutan mengacu pada kemampuan suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya (Brundtland Report, 1987). Dalam konteks industri, sustainability mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Industri kelapa sawit sebagai sektor agribisnis skala besar memiliki dampak signifikan terhadap ketiga dimensi tersebut, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan menjadi keharusan dalam mengelola industri ini agar tetap produktif dan bertanggung jawab. Prinsip ini juga mendasari berbagai standar global seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Dari segi lingkungan, prinsip keberlanjutan menuntut perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, konservasi lahan gambut, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Industri kelapa sawit telah dikritik karena kontribusinya terhadap deforestasi dan degradasi ekosistem, khususnya di Sumatera dan Kalimantan (Carlson et al., 2012). Oleh karena itu, pelaku industri dituntut untuk menerapkan praktik budidaya yang ramah lingkungan, seperti pengelolaan lahan tanpa pembakaran dan penggunaan pupuk yang efisien. RSPO, misalnya, mengatur kewajiban pelestarian High Conservation Value (HCV) area dalam areal konsesi kelapa sawit. Kepatuhan terhadap

prinsip-prinsip ini dinilai penting untuk menjaga legitimasi dan akses pasar global.

Dari aspek sosial, sustainability menekankan pada penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan pekerja, termasuk hak atas tanah, kebebasan berserikat, serta kondisi kerja yang layak. Banyak konflik agraria di sektor kelapa sawit berakar pada pengabaian hak-hak masyarakat adat dan petani kecil (Colchester et al., 2006). Oleh karena itu, prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) menjadi elemen penting dalam pendekatan keberlanjutan. Industri juga perlu memastikan distribusi manfaat yang adil kepada petani plasma, buruh perkebunan, dan komunitas sekitar. Pendekatan ini mendorong model pembangunan yang lebih inklusif dan etis.

Secara ekonomi, prinsip keberlanjutan menghendaki stabilitas pendapatan dan efisiensi produksi yang tidak merusak daya dukung lingkungan dan sosial. Keberlanjutan ekonomi dalam industri kelapa sawit dapat dicapai melalui diversifikasi produk, efisiensi rantai pasok, dan inovasi teknologi pertanian. Selain itu, akses terhadap pasar premium yang mensyaratkan sertifikasi keberlanjutan dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk sawit. Petani kecil sebagai pelaku utama dalam rantai pasok juga harus dilibatkan secara aktif dalam pengembangan kapasitas dan pembiayaan. Integrasi antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial-lingkungan menjadi landasan dari keberlanjutan industri ini.

Prinsip-prinsip sustainability telah diadopsi dalam kebijakan nasional melalui program ISPO yang mewajibkan sertifikasi bagi semua pelaku usaha kelapa sawit di Indonesia. Meskipun demikian, efektivitas penerapan prinsip ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kapasitas petani, dan konflik kepentingan antar aktor (Jelsma et al., 2019). Selain itu, standar keberlanjutan sering dianggap sebagai beban tambahan oleh petani kecil yang tidak memiliki sumber daya memadai untuk memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, dukungan teknis dan insentif ekonomi perlu diberikan agar prinsip ini dapat diterapkan secara adil dan merata. Pendekatan ini penting untuk memastikan keberlanjutan bukan hanya menjadi wacana elit, melainkan juga menjadi praktik sehari-hari di lapangan.

Partisipasi generasi muda menjadi salah satu elemen penting dalam menerapkan prinsip sustainability dalam industri kelapa sawit. Generasi muda memiliki kapasitas untuk memperkenalkan inovasi teknologi seperti digitalisasi lahan, pemantauan berbasis satelit, dan sistem pertanian presisi. Selain itu, mereka cenderung lebih sadar terhadap isu lingkungan dan sosial, serta memiliki kemampuan untuk mengadvokasi perubahan kebijakan. Dengan mengintegrasikan generasi muda ke dalam struktur tata kelola industri, prinsip keberlanjutan dapat diterapkan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, model manajemen partisipatif yang melibatkan pemuda

memiliki potensi besar dalam mendorong transformasi industri sawit ke arah yang lebih hijau dan inklusif.

Prinsip-prinsip sustainability tidak hanya berfungsi sebagai panduan etik, tetapi juga sebagai strategi bisnis jangka panjang yang mendukung ketahanan industri. Perusahaan yang menerapkan prinsip ini cenderung memiliki kinerja keuangan lebih stabil dan reputasi yang lebih baik di mata investor dan konsumen (Eccles et al., 2014). Oleh karena itu, keberlanjutan harus diintegrasikan dalam setiap level pengambilan keputusan, mulai dari kebijakan nasional hingga praktik harian di lapangan. Dalam konteks Penulisan buku ini, prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi konseptual dalam merancang model partisipatif yang responsif terhadap tantangan dan kebutuhan industri. Dengan demikian, keberlanjutan bukan sekadar idealisme, melainkan instrumen nyata untuk perubahan sistemik.

2.4 Studi Terkait tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Industri Perkebunan

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam telah menjadi topik penting dalam studi pembangunan berkelanjutan. Penulisan buku yang dilakukan oleh Agrawal dan Gibson (1999) menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif dalam tata kelola hutan dan perkebunan, dengan menekankan bahwa desain kelembagaan yang inklusif mendorong efisiensi dan keberlanjutan. Partisipasi masyarakat, ketika dikelola secara otentik, mampu meningkatkan legitimasi program dan

mengurangi konflik. Namun, keterlibatan tersebut kerap bersifat simbolik (tokenism) bila tidak didukung oleh mekanisme pengambilan keputusan yang setara. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat perlu dilihat sebagai proses deliberatif yang melibatkan negosiasi dan pemberdayaan.

Dalam konteks industri kelapa sawit, keterlibatan masyarakat lokal menjadi isu yang sangat penting, terutama terkait dengan akses terhadap lahan dan distribusi manfaat ekonomi. Studi oleh Colchester dan Chao (2013) mengungkapkan bahwa banyak konflik sosial dalam industri sawit di Indonesia dan Malaysia berakar pada kegagalan dalam mendapatkan persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC). Ketidakterlibatan masyarakat adat dalam perencanaan proyek perkebunan telah menyebabkan marginalisasi dan pelanggaran hak atas tanah. Selain itu, masyarakat sekitar kerap hanya dilibatkan dalam proses konsultasi yang tidak memiliki dampak substantif terhadap kebijakan perusahaan. Ini menunjukkan bahwa partisipasi sejati belum sepenuhnya menjadi praktik umum dalam industri perkebunan.

Pendekatan partisipatif yang berhasil dapat ditemukan dalam model agroforestri berbasis masyarakat di beberapa wilayah Asia Tenggara. Sebagai contoh, di Filipina dan Thailand, program rehabilitasi hutan berbasis masyarakat telah menunjukkan peningkatan pendapatan dan konservasi lingkungan yang lebih baik (Kellert et al.,

2000). Keberhasilan ini didasarkan pada desain kelembagaan yang fleksibel, insentif ekonomi yang jelas, dan dukungan teknis yang berkelanjutan dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Model seperti ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya berguna untuk legitimasi sosial, tetapi juga sebagai strategi efektif dalam mencapai tujuan ekologi dan ekonomi. Relevansi model tersebut dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi sektor kelapa sawit.

Di Indonesia, program revitalisasi perkebunan dan kemitraan inti-plasma menjadi upaya pemerintah untuk melibatkan petani kecil secara aktif dalam rantai pasok industri sawit. Penulisan buku oleh Jelsma et al. (2017) menemukan bahwa model kemitraan ini memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, tetapi keberhasilannya sangat tergantung pada transparansi kontrak, akses pembiayaan, dan kapasitas organisasi petani. Dalam banyak kasus, ketimpangan informasi dan dominasi perusahaan menyebabkan petani berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan petani dan keterlibatan mereka dalam perencanaan sangat penting untuk menjamin keberhasilan jangka panjang. Hal ini sekaligus memperlihatkan perlunya model partisipatif yang lebih setara dan adil.

Studi lain oleh Larson et al. (2016) menunjukkan bahwa desentralisasi tata kelola hutan dan perkebunan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat jika disertai

dengan mekanisme akuntabilitas dan alokasi sumber daya yang memadai. Dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah yang masih menghadapi keterbatasan kapasitas dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat secara bermakna. Keterbatasan ini mencakup aspek administratif, politik, dan finansial, yang berdampak pada kualitas tata kelola di tingkat lokal. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perkebunan perlu dikaitkan dengan reformasi kebijakan dan penguatan kapasitas pemerintahan lokal. Pendekatan ini relevan bagi industri sawit yang tersebar luas di daerah pedesaan dan bergantung pada interaksi antara aktor lokal dan nasional.

Beberapa studi juga menyoroti pentingnya dimensi generasi dalam partisipasi masyarakat, terutama dalam konteks perubahan sosial dan regenerasi petani. Penulisan buku oleh Kristiansen et al. (2021) menunjukkan bahwa kaum muda seringkali memiliki pandangan yang berbeda tentang pengelolaan sumber daya dibandingkan generasi yang lebih tua. Generasi muda lebih terbuka terhadap inovasi dan teknologi, tetapi juga lebih kritis terhadap praktik-praktik industri yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, model partisipatif yang efektif harus mempertimbangkan keragaman generasi dan membangun mekanisme dialog antar kelompok umur. Keterlibatan generasi muda menjadi aspek penting dalam mempertahankan keberlanjutan sosial jangka panjang di sektor perkebunan.

Secara umum, studi-studi terkait menunjukkan bahwa keberhasilan partisipasi masyarakat dalam sektor perkebunan sangat bergantung pada desain kelembagaan, keadilan distribusi manfaat, dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal. Tanpa pemenuhan tiga syarat tersebut, partisipasi cenderung bersifat kosmetik dan berisiko menciptakan konflik baru. Dengan belajar dari berbagai studi ini, Penulisan buku dan model yang dikembangkan dalam buku ini akan menekankan pentingnya inklusi, transparansi, dan kolaborasi lintas aktor. Hal ini menjadi dasar dalam merancang model manajemen partisipatif yang dapat mengakomodasi peran generasi muda secara efektif. Integrasi pengalaman lokal dan temuan empiris sangat krusial untuk membangun model yang responsif dan aplikatif.

2.5 Teori Keterlibatan Sosial dan Partisipasi

Keterlibatan sosial (social engagement) dan partisipasi masyarakat merupakan konsep yang banyak dibahas dalam ilmu sosial, khususnya dalam konteks pembangunan komunitas dan tata kelola sumber daya alam. Teori partisipasi sosial menekankan pentingnya kontribusi aktif individu dalam proses kolektif yang menyangkut kepentingan bersama (Pretty, 1995). Keterlibatan ini bisa bersifat formal, seperti melalui keanggotaan dalam organisasi, atau informal, seperti pengambilan keputusan dalam lingkup komunitas. Bentuk partisipasi sangat bergantung pada struktur sosial, norma lokal, dan relasi kekuasaan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena

itu, partisipasi tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan politik tempat ia berlangsung.

Arnstein (1969) melalui model "Ladder of Citizen Participation" mengklasifikasikan partisipasi ke dalam delapan tingkat, mulai dari manipulasi (non-participation) hingga citizen control (kontrol penuh oleh warga). Model ini menunjukkan bahwa tidak semua bentuk partisipasi memiliki kualitas yang setara; ada partisipasi yang bersifat simbolis dan ada pula yang substantif. Dalam konteks industri, bentuk partisipasi yang lebih tinggi seperti kemitraan dan delegasi kekuasaan jarang terjadi, karena ketimpangan relasi antara perusahaan dan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan kerangka Arnstein membantu mengevaluasi sejauh mana keterlibatan masyarakat benar-benar bermakna. Model ini juga bermanfaat dalam merancang intervensi kebijakan yang lebih inklusif.

Teori lain yang relevan adalah teori tindakan komunikatif dari Habermas (1984), yang menekankan pentingnya komunikasi bebas dominasi dalam proses deliberasi publik. Dalam konteks ini, partisipasi dipahami sebagai interaksi rasional antar warga yang setara untuk mencapai pemahaman bersama (mutual understanding). Model ini relevan dalam merancang forum dialog antara pemuda, pemerintah, dan industri sawit, di mana setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyuarakan kepentingannya secara terbuka. Namun, syarat utama keberhasilan pendekatan ini adalah adanya akses informasi yang adil dan mekanisme penyelesaian konflik yang jelas.

Dalam praktiknya, banyak forum partisipatif gagal memenuhi prasyarat ini, sehingga menimbulkan frustrasi masyarakat.

Selain teori komunikasi, pendekatan teori kapabilitas (*capability approach*) yang dikembangkan oleh Amartya Sen (1999) juga penting untuk menjelaskan partisipasi sebagai ekspresi kebebasan individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna. Partisipasi yang bermakna hanya mungkin terjadi jika individu memiliki kemampuan (*capability*) dan sumber daya untuk berkontribusi. Dalam konteks generasi muda di industri kelapa sawit, keterlibatan mereka tidak hanya bergantung pada kemauan, tetapi juga pada akses terhadap pendidikan, informasi, dan peluang ekonomi. Oleh karena itu, program pemberdayaan harus dirancang untuk memperluas kapabilitas ini agar partisipasi dapat terjadi secara adil. Model manajemen partisipatif yang efektif harus mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan kapabilitas ini.

Social identity theory dari Tajfel dan Turner (1986) memberikan kerangka untuk memahami bagaimana identitas kelompok memengaruhi tingkat partisipasi sosial. Generasi muda sering membentuk identitas mereka berdasarkan nilai, komunitas, dan aspirasi tertentu yang mungkin berbeda dari generasi sebelumnya. Jika industri kelapa sawit dipersepsikan bertentangan dengan nilai lingkungan atau keadilan sosial yang diyakini generasi muda, maka mereka cenderung menjauh. Oleh karena itu, penting bagi industri dan pembuat kebijakan untuk

memahami dinamika identitas ini dalam merancang strategi pelibatan. Identitas sosial juga berperan dalam membangun rasa memiliki (*sense of belonging*), yang merupakan prasyarat partisipasi jangka panjang.

Teori struktural-fungsional dari Parsons (1951) memandang partisipasi sebagai bagian dari sistem sosial yang bertujuan menjaga stabilitas dan keteraturan masyarakat. Dalam kerangka ini, partisipasi dianggap sebagai mekanisme integratif yang memperkuat kohesi sosial dan memperlancar fungsi institusi. Namun, teori ini sering dikritik karena mengabaikan ketimpangan kekuasaan dan konflik struktural dalam masyarakat. Dalam konteks industri kelapa sawit, penting untuk menggabungkan perspektif ini dengan pendekatan kritis agar tidak terjebak pada pandangan yang normatif. Dengan demikian, teori ini lebih bermanfaat bila digunakan secara selektif dalam konteks pembangunan institusional yang partisipatif.

Berdasarkan berbagai teori di atas, partisipasi dapat dipahami sebagai proses multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor struktural, psikologis, komunikasi, dan identitas. Dalam merancang model manajemen partisipatif berbasis generasi muda, penting untuk mengintegrasikan teori-teori ini secara kontekstual. Pendekatan yang hanya mengandalkan partisipasi prosedural cenderung gagal karena tidak menyentuh akar persoalan sosial dan struktural. Oleh karena itu, Penulisan buku ini akan memanfaatkan teori keterlibatan sosial dan

partisipasi sebagai dasar dalam membangun kerangka konseptual yang kuat. Model yang akan dikembangkan bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan partisipasi, tetapi juga untuk memperkuat posisi tawar dan transformasi sosial dalam industri kelapa sawit.

BAB 3: ANALISIS PARTISIPASI GENERASI MUDA DALAM INDUSTRI KELAPA SAWIT

3.1 Profil Demografis dan Sosial Generasi Muda di Wilayah Perkebunan

Analisis profil generasi muda dilakukan untuk memahami latar belakang demografis yang memengaruhi keterlibatan mereka dalam industri kelapa sawit. Berdasarkan hasil survei terhadap 500 responden dari empat provinsi, sebagian besar responden berusia antara 21–30 tahun, dengan proporsi laki-laki sebesar 62% dan perempuan 38%. Tingkat pendidikan mayoritas adalah SMA/ sederajat (52%), diikuti oleh diploma/ sarjana (30%) dan sisanya tidak menyelesaikan pendidikan menengah. Pekerjaan responden bervariasi, mulai dari buruh harian di perkebunan, petani keluarga, pelaku usaha mikro, hingga pekerja lepas terkait logistik atau pengolahan. Faktor pendidikan dan jenis pekerjaan ini berpengaruh terhadap persepsi dan kapasitas partisipatif mereka.

Dari sisi tempat tinggal, 78% responden tinggal di desa-desa yang berada dalam radius 10 km dari area perkebunan kelapa sawit. Sebagian besar dari mereka memiliki pengalaman langsung atau tidak langsung dengan industri sawit, baik sebagai pekerja, anggota keluarga petani, maupun penerima dampak sosial-lingkungan. Akses terhadap internet dan informasi publik menunjukkan peningkatan, di mana 61% responden menyatakan sering mencari informasi terkait lingkungan dan keberlanjutan

secara daring. Namun, hanya 25% yang mengaku pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi terkait industri sawit berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan informasi dan pelibatan generasi muda dalam edukasi formal dan informal.

Distribusi responden menunjukkan variasi antar provinsi, baik dalam hal akses pendidikan, layanan publik, maupun keikutsertaan dalam kegiatan komunitas. Provinsi Riau dan Kalimantan Barat mencatat angka keterlibatan komunitas pemuda yang lebih tinggi dibandingkan Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah. Faktor ini berkaitan erat dengan keberadaan LSM, program CSR perusahaan, dan dukungan pemerintah daerah. Keberadaan organisasi pemuda seperti Karang Taruna atau komunitas tani muda terbukti menjadi faktor penguat partisipasi sosial. Organisasi semacam ini sering kali menjadi wahana belajar, diskusi, dan advokasi bagi para pemuda di wilayah perkebunan.

Faktor gender juga memiliki implikasi penting dalam analisis partisipasi. Pemuda laki-laki cenderung lebih terlibat dalam pekerjaan fisik di lapangan, sementara perempuan lebih banyak terlibat dalam kegiatan pengolahan, keuangan keluarga, dan aktivitas sosial di tingkat komunitas. Namun, partisipasi perempuan masih menghadapi hambatan struktural seperti beban ganda dan norma budaya yang membatasi ruang publik mereka. Beberapa inisiatif lokal, seperti koperasi perempuan atau pelatihan kewirausahaan berbasis rumah tangga, mulai

muncul di beberapa wilayah. Dukungan kelembagaan terhadap kesetaraan gender perlu diperkuat agar seluruh kelompok pemuda dapat berpartisipasi secara adil dan bermakna.

Aspek sosial ekonomi juga memengaruhi tingkat keterlibatan generasi muda. Pemuda dari keluarga petani plasma menunjukkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak memiliki hubungan langsung dengan sektor perkebunan. Hal ini dikarenakan akses terhadap lahan, modal, dan jaringan sosial yang lebih tersedia di kalangan keluarga petani. Sebaliknya, generasi muda dari keluarga buruh sawit sering kali menghadapi keterbatasan mobilitas sosial dan kurangnya insentif untuk bertahan di sektor ini. Oleh karena itu, program intervensi perlu mempertimbangkan struktur sosial ekonomi lokal agar intervensi tidak bersifat homogen.

Nilai dan aspirasi generasi muda juga menjadi faktor penting dalam membentuk partisipasi mereka. Banyak pemuda menyatakan bahwa keberlanjutan dan keadilan lingkungan merupakan nilai yang penting dalam memilih pekerjaan atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Mereka juga menunjukkan minat tinggi terhadap teknologi pertanian, kewirausahaan sosial, dan praktik pertanian regeneratif. Namun, sebagian besar belum melihat industri kelapa sawit sebagai sektor yang sejalan dengan aspirasi tersebut, karena citra negatif yang melekat padanya. Transformasi narasi dan transparansi praktik industri

menjadi kunci untuk menarik generasi muda secara lebih luas.

Secara keseluruhan, profil generasi muda di wilayah perkebunan menunjukkan potensi besar untuk dilibatkan dalam transformasi keberlanjutan industri kelapa sawit. Mereka memiliki energi, aspirasi, dan kemampuan adaptif yang tinggi, namun masih menghadapi hambatan struktural dan informasi. Pendekatan partisipatif yang kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal menjadi prasyarat dalam mengintegrasikan generasi muda dalam sistem tata kelola industri. Oleh karena itu, pemetaan demografis ini menjadi dasar penting dalam perancangan model manajemen partisipatif yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab berikutnya. Profil ini juga menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri dalam menyusun program pelibatan pemuda.

3.2 Tingkat Partisipasi Generasi Muda dalam Kegiatan Industri

Tingkat partisipasi generasi muda dalam industri kelapa sawit masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Berdasarkan hasil survei, hanya 36% dari total responden yang menyatakan terlibat langsung dalam aktivitas industri, baik sebagai tenaga kerja, petani plasma, atau pelaku usaha terkait. Dari kelompok ini, mayoritas terlibat pada level operasional seperti panen, pemupukan, dan transportasi hasil panen. Keterlibatan dalam aspek manajerial, inovasi, atau pengambilan keputusan masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan

bahwa partisipasi generasi muda cenderung bersifat pasif dan struktural, bukan partisipasi yang transformatif atau strategis.

Partisipasi informal, seperti kegiatan komunitas yang berkaitan dengan sawit, juga relatif rendah, hanya sebesar 19% dari responden. Kegiatan informal ini mencakup penyuluhan lingkungan, pelatihan petani muda, atau pengelolaan sampah dan limbah organik di sekitar perkebunan. Generasi muda yang terlibat dalam kegiatan ini umumnya berasal dari komunitas dengan dukungan LSM atau perusahaan melalui program CSR. Namun, keberadaan program semacam ini masih sporadis dan tidak menyeluruh ke semua wilayah. Ketidaktersebaran inisiatif ini berdampak pada rendahnya pemahaman dan keterlibatan kolektif pemuda dalam isu keberlanjutan industri.

Dari segi jenis kelamin, partisipasi laki-laki tercatat lebih tinggi (43%) dibandingkan perempuan (27%) dalam kegiatan langsung industri sawit. Hal ini disebabkan oleh dominasi tenaga kerja laki-laki pada pekerjaan berat di lapangan. Namun, perempuan muda menunjukkan kecenderungan lebih aktif dalam kegiatan pendidikan lingkungan, usaha rumah tangga berbasis sawit, dan koperasi komunitas. Meskipun kontribusinya penting, aktivitas ini sering kali tidak diakui secara formal sebagai bagian dari sistem industri. Rendahnya pengakuan ini mempengaruhi semangat dan rasa kepemilikan terhadap industri di kalangan pemuda perempuan.

Tingkat partisipasi juga berkorelasi dengan latar belakang pendidikan dan akses terhadap informasi. Responden dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi menunjukkan partisipasi lebih aktif dalam bentuk ide dan gagasan, namun lebih selektif dalam memilih peran di industri. Mereka cenderung tertarik pada bidang inovasi pertanian, sertifikasi berkelanjutan, dan pengolahan produk bernilai tambah. Sebaliknya, pemuda dengan latar belakang pendidikan dasar atau menengah lebih banyak terlibat sebagai pekerja lapangan atau buruh kontrak. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya intervensi berbasis pendidikan dalam meningkatkan kualitas partisipasi generasi muda.

Dalam aspek organisasi, hanya 22% responden yang tergabung dalam komunitas atau kelompok yang berfokus pada isu sawit atau pertanian berkelanjutan. Organisasi ini mencakup karang taruna pertanian, kelompok tani muda, dan forum pemuda desa. Partisipasi dalam organisasi terbukti meningkatkan peluang keterlibatan aktif dalam pelatihan, advokasi, dan akses terhadap jaringan kerja. Namun, keberadaan organisasi ini masih terbatas pada wilayah tertentu dan belum mendapat dukungan sistematis dari pemerintah maupun swasta. Ini menunjukkan bahwa pembinaan kelembagaan menjadi prasyarat penting dalam memperluas basis partisipasi.

Salah satu temuan penting adalah bahwa banyak generasi muda tidak melihat industri kelapa sawit sebagai ruang aspiratif. Sebagian besar responden mengaitkan

industri ini dengan konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan dominasi perusahaan besar. Persepsi negatif ini menyebabkan rendahnya motivasi untuk berkontribusi secara aktif, bahkan di kalangan pemuda yang tinggal dekat dengan perkebunan. Selain itu, kurangnya transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan memperkuat ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada. Perubahan persepsi dan penciptaan narasi alternatif menjadi langkah penting untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda.

Secara keseluruhan, tingkat partisipasi generasi muda dalam industri kelapa sawit masih terbatas baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Keterlibatan mereka lebih sering terjadi pada level implementasi dan pekerjaan rutin, bukan pada aspek strategis yang dapat membentuk arah industri. Hal ini memperlihatkan pentingnya merancang model partisipatif yang memberikan ruang pengaruh yang lebih besar bagi pemuda. Model tersebut harus mendorong keterlibatan aktif dalam inovasi, kepemimpinan komunitas, dan pembangunan sistem keberlanjutan dari bawah. Temuan ini menjadi dasar penting dalam pengembangan model manajemen partisipatif yang dibahas di Bab 5.

3.3 Motivasi dan Hambatan Partisipasi

Motivasi generasi muda untuk terlibat dalam industri kelapa sawit sangat bervariasi, tergantung pada faktor ekonomi, sosial, dan nilai pribadi. Hasil survei

menunjukkan bahwa 45% responden menyatakan motivasi utama mereka adalah penghasilan tetap yang ditawarkan sektor ini. Stabilitas pekerjaan dan keterikatan geografis juga menjadi alasan utama bagi sebagian pemuda yang enggan bermigrasi ke kota. Beberapa responden menyebutkan bahwa keterlibatan mereka merupakan kelanjutan dari pekerjaan keluarga, terutama di kalangan petani plasma. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan warisan keluarga tetap menjadi pendorong utama partisipasi.

Selain faktor ekonomi, sebagian kecil generasi muda juga termotivasi oleh aspirasi keberlanjutan dan inovasi pertanian. Sekitar 18% responden tertarik mengembangkan teknologi atau praktik pertanian yang ramah lingkungan, seperti pemupukan organik atau diversifikasi produk berbasis sawit. Mereka memandang sektor sawit sebagai ruang untuk bereksperimen dengan model bisnis baru yang berkelanjutan. Kelompok ini umumnya memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi dan akses terhadap pelatihan atau literasi digital. Meskipun masih minoritas, kelompok ini penting untuk diperkuat karena dapat menjadi agen transformasi industri dari dalam.

Aspek sosial juga mendorong keterlibatan generasi muda, khususnya dalam bentuk partisipasi komunitas dan solidaritas lokal. Di wilayah dengan budaya kolektif yang kuat, generasi muda cenderung lebih aktif dalam kegiatan desa atau kelompok tani. Beberapa dari mereka terlibat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan, pendidikan

masyarakat, dan kampanye sosial yang terkait dengan industri sawit. Rasa tanggung jawab terhadap komunitas lokal seringkali menjadi motivasi yang kuat, bahkan lebih besar dari kepentingan ekonomi pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi juga dipengaruhi oleh nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Namun, di balik motivasi tersebut, terdapat sejumlah hambatan yang signifikan dalam menghalangi partisipasi generasi muda. Hambatan pertama adalah akses terhadap informasi dan pelatihan yang relevan. Sebagian besar responden menyatakan belum pernah mendapatkan pelatihan tentang tata kelola industri sawit, keberlanjutan, atau kewirausahaan agribisnis. Kurangnya literasi teknis dan administratif membuat pemuda kesulitan untuk memahami peluang dan hak mereka dalam industri. Kondisi ini diperparah oleh minimnya program pemerintah atau perusahaan yang secara khusus menargetkan kelompok usia muda.

Hambatan berikutnya adalah keterbatasan akses terhadap lahan dan modal, yang membuat pemuda sulit untuk memulai usaha sendiri atau bergabung sebagai petani mandiri. Banyak pemuda tidak memiliki warisan tanah, sementara harga lahan dan prosedur legal yang kompleks menjadi penghalang bagi kepemilikan baru. Bahkan dalam skema kemitraan, posisi pemuda seringkali tidak diakui atau dilibatkan secara formal. Akibatnya, mereka lebih sering berada pada posisi buruh ketimbang pelaku usaha atau pengambil keputusan. Ketimpangan ini menciptakan

siklus ketergantungan yang menghambat kemandirian ekonomi pemuda.

Faktor lain yang juga menjadi hambatan adalah persepsi negatif terhadap industri sawit. Banyak generasi muda memandang industri ini sebagai sektor yang tidak ramah lingkungan, penuh konflik sosial, dan minim transparansi. Persepsi ini diperkuat oleh pemberitaan media dan narasi global yang menyoroti sisi gelap ekspansi perkebunan sawit. Meskipun sebagian dari persepsi ini berbasis fakta, ketidakseimbangan informasi menyebabkan munculnya sikap apatis atau bahkan penolakan terhadap industri secara keseluruhan. Oleh karena itu, perubahan citra dan komunikasi yang lebih terbuka menjadi strategi penting dalam membangun kepercayaan generasi muda.

Motivasi dan hambatan partisipasi yang telah diidentifikasi dalam subbab ini menggambarkan kompleksitas posisi generasi muda dalam ekosistem industri kelapa sawit. Mereka memiliki potensi besar sebagai agen perubahan, tetapi sering terjebak dalam sistem yang tidak mendukung pertumbuhan dan partisipasi mereka secara optimal. Dibutuhkan intervensi yang bersifat struktural dan berbasis kebutuhan riil agar motivasi yang ada tidak padam oleh hambatan yang terus berulang. Bab selanjutnya akan mengusulkan model partisipatif yang merespons temuan ini secara sistemik. Dengan pendekatan yang tepat, motivasi generasi muda dapat dikonversi menjadi keterlibatan aktif dan transformatif.

3.4 Keterkaitan antara Partisipasi dan Keberlanjutan

Partisipasi generasi muda dalam industri kelapa sawit memiliki hubungan yang erat dengan pencapaian keberlanjutan sektor ini secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keberlanjutan memerlukan keterlibatan semua aktor yang terdampak langsung oleh kegiatan industri, termasuk pemuda yang merupakan populasi produktif dan pewaris lahan di masa depan. Ketika generasi muda terlibat dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program industri, maka legitimasi sosial dan efektivitas kebijakan meningkat (Pretty, 1995). Partisipasi yang bermakna juga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap sumber daya dan sistem tata kelola. Dengan demikian, keterlibatan pemuda bukan hanya soal keterwakilan, tetapi juga mekanisme untuk memperkuat tata kelola berkelanjutan.

Hasil survei menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat partisipasi pemuda yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat adopsi praktik keberlanjutan yang lebih baik, seperti penggunaan pupuk organik, pengelolaan limbah, dan pelestarian lahan gambut. Di Kabupaten Seruyan (Kalimantan Tengah), misalnya, komunitas petani muda yang aktif dalam kelompok tani menunjukkan kesadaran tinggi terhadap prinsip-prinsip RSPO dan ISPO. Mereka terlibat dalam pelatihan dan advokasi yang mendorong praktik budidaya ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemuda difasilitasi untuk belajar dan berkontribusi, maka keberlanjutan menjadi lebih realistis untuk dicapai. Kontribusi generasi muda membawa

inovasi, kecepatan adaptasi, dan perspektif jangka panjang ke dalam sistem industri.

Sebaliknya, di wilayah dengan partisipasi rendah, seperti sebagian desa di Rokan Hilir (Riau), praktik pengelolaan kebun masih cenderung eksploitatif dan berorientasi jangka pendek. Minimnya pelibatan generasi muda berkontribusi terhadap stagnasi praktik konvensional dan penurunan kualitas lingkungan. Dalam kondisi ini, kebijakan keberlanjutan yang bersifat top-down tidak mampu berjalan efektif tanpa aktor lokal yang aktif. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kapasitas sosial yang tumbuh dari partisipasi komunitas, khususnya pemuda. Oleh karena itu, partisipasi adalah fondasi sosial dari keberlanjutan, bukan sekadar pelengkap kebijakan.

Dari perspektif sosial, partisipasi pemuda memperkuat kohesi komunitas dan mengurangi konflik. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program meningkatkan rasa keadilan, transparansi, dan tanggung jawab kolektif. Dalam beberapa studi, partisipasi pemuda terbukti menurunkan tingkat konflik lahan karena adanya komunikasi lintas generasi dan transparansi informasi (Larson et al., 2016). Keterlibatan ini juga meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan pemerintah melalui mekanisme pengawasan sosial. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif menjadi instrumen efektif dalam membangun relasi sosial yang sehat di sekitar industri sawit.

Pada aspek ekonomi, partisipasi generasi muda menciptakan inovasi dalam rantai pasok dan diversifikasi usaha. Pemuda yang terlibat dalam kewirausahaan sawit menunjukkan kecenderungan untuk mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah seperti sabun organik, briket limbah, dan minyak goreng kemasan. Inovasi ini memperluas pasar lokal dan meningkatkan efisiensi rantai distribusi. Selain itu, keterlibatan aktif dalam proses ekonomi memperkuat daya tahan komunitas terhadap fluktuasi harga pasar global. Dengan demikian, keberlanjutan ekonomi tidak hanya datang dari skala besar, tetapi juga dari inisiatif mikro yang didorong oleh keterlibatan generasi muda.

Dari sisi lingkungan, partisipasi pemuda terbukti mendorong perubahan perilaku kolektif dalam pengelolaan sumber daya alam. Program konservasi berbasis pemuda, seperti reforestasi pinggiran kebun, pengawasan praktik pembakaran, dan pemetaan kawasan konservasi, telah dilakukan di beberapa wilayah dengan dukungan lembaga lokal. Semangat relawan dan solidaritas antar komunitas menjadi kunci dari keberhasilan inisiatif ini. Partisipasi ini memberikan dampak langsung pada pengurangan risiko lingkungan dan pelestarian habitat yang sering terabaikan dalam proyek komersial. Oleh karena itu, keberlanjutan ekologis semakin kuat jika didukung oleh inisiatif akar rumput dari generasi muda.

Keseluruhan temuan menunjukkan bahwa keberlanjutan industri kelapa sawit sangat tergantung pada kapasitas dan kemauan sosial untuk berpartisipasi. Keterlibatan generasi muda bukan sekadar pengganti tenaga kerja yang menua, tetapi agen inovasi, integritas sosial, dan keberlanjutan jangka panjang. Ketika model partisipatif dibangun secara sistematis dan adaptif, maka tercipta ekosistem industri yang inklusif dan resilien. Bab berikutnya akan menjabarkan rancangan model partisipatif yang dapat mendorong kontribusi aktif generasi muda dalam mendukung keberlanjutan industri sawit. Model tersebut dirancang berdasarkan temuan empiris dan kerangka teoritis yang telah dijelaskan sebelumnya.

3.5 Studi Kasus Keterlibatan Generasi Muda di Wilayah Sumatera dan Kalimantan

Studi kasus pertama dilakukan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang merupakan salah satu sentra produksi kelapa sawit di Sumatera. Di wilayah ini, komunitas pemuda di Desa Makmur Jaya membentuk koperasi tani muda yang fokus pada peningkatan produktivitas sawit rakyat dengan prinsip berkelanjutan. Kegiatan utama koperasi meliputi pelatihan pemupukan organik, pendampingan teknis, dan pengolahan limbah menjadi pupuk cair. Koperasi ini mendapat dukungan dari LSM lokal dan program CSR perusahaan perkebunan swasta. Hasilnya, terjadi peningkatan partisipasi pemuda dalam praktik pertanian sekaligus terbentuk jejaring sosial antar komunitas.

Partisipasi di Pelalawan ditopang oleh dukungan kelembagaan dan akses terhadap pelatihan, yang membuat pemuda tidak hanya terlibat sebagai pekerja, tetapi juga sebagai pengambil inisiatif. Menurut ketua koperasi, keikutsertaan pemuda semakin tinggi setelah mereka dilibatkan sejak tahap perencanaan kegiatan. Keberhasilan program ini menunjukkan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam membangun struktur organisasi yang responsif dan terbuka. Kegiatan komunitas ini juga mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya sertifikasi RSPO dan praktik konservasi lahan. Dengan membangun kepercayaan sosial dan kapasitas teknis, pemuda menjadi aktor utama dalam transformasi sistem pertanian.

Sementara itu, studi kasus di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menunjukkan dinamika berbeda. Di wilayah ini, inisiatif partisipatif muncul melalui Forum Pemuda Sawit Lestari yang dibentuk atas inisiatif kelompok pemuda desa dengan dukungan fasilitator NGO internasional. Forum ini berfungsi sebagai ruang diskusi, pelatihan, dan advokasi yang menyoroti isu sosial dan lingkungan di sekitar perkebunan. Salah satu agenda utama mereka adalah mendorong perusahaan perkebunan agar membuka akses terhadap lahan untuk pemuda desa melalui skema kemitraan. Forum ini berhasil mempertemukan pemuda, pemerintah desa, dan pihak perusahaan dalam dialog terbuka yang difasilitasi secara rutin.

Keterlibatan pemuda di Seruyan bersifat lebih politis dan advokatif dibandingkan kasus di Pelalawan. Pemuda tidak hanya menuntut akses terhadap sumber daya, tetapi juga menuntut transparansi dalam pembagian hasil dan partisipasi dalam penyusunan dokumen AMDAL. Meski tidak semua tuntutan mereka terpenuhi, kehadiran forum ini menciptakan tekanan moral dan sosial bagi perusahaan agar memperbaiki praktik bisnisnya. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi generasi muda dapat mengambil berbagai bentuk, dari teknis-produktif hingga kritis-advokatif. Konteks sosial dan sejarah hubungan perusahaan-masyarakat sangat memengaruhi bentuk partisipasi yang muncul.

Studi lain di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menunjukkan bagaimana integrasi pendidikan dan partisipasi menghasilkan inovasi yang berkelanjutan. Di wilayah ini, kelompok mahasiswa pertanian membentuk usaha sosial berbasis sawit dengan pendekatan ekonomi sirkular. Mereka mengembangkan produk olahan seperti sabun dari limbah kelapa sawit, serta memberikan pelatihan kepada petani lokal mengenai diversifikasi usaha. Kegiatan ini bermitra dengan sekolah kejuruan dan kampus lokal untuk menjangkau lebih banyak pemuda desa. Dengan cara ini, keterlibatan pemuda dipadukan dengan transfer pengetahuan dan penguatan kewirausahaan.

Berbeda dengan wilayah lain, partisipasi di Sambas didorong oleh kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Faktor keberhasilan

terletak pada konsistensi pelatihan, pendanaan awal yang inklusif, serta keterbukaan pemerintah lokal dalam mengadopsi inovasi pemuda. Kegiatan pemuda tidak hanya berdampak pada pendapatan, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang terhadap limbah dan nilai tambah. Studi ini menegaskan bahwa dukungan lintas sektor menjadi kunci utama untuk membangun partisipasi yang produktif dan inovatif. Sinergi antarlembaga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi komunitas pemuda.

Tiga studi kasus tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi generasi muda dalam industri sawit sangat dipengaruhi oleh faktor lokal, termasuk sejarah interaksi, bentuk dukungan kelembagaan, serta tingkat pendidikan dan organisasi. Tidak ada satu model tunggal yang dapat diterapkan di seluruh wilayah, namun terdapat pola-pola keberhasilan yang dapat direplikasi secara adaptif. Mulai dari koperasi, forum advokasi, hingga usaha sosial, seluruhnya memperlihatkan bentuk kontribusi generasi muda terhadap keberlanjutan industri. Temuan ini mendasari pentingnya fleksibilitas dalam merancang model manajemen partisipatif. Pada bab berikutnya, temuan lapangan ini akan dijadikan pijakan dalam merancang model teoritis yang kontekstual dan aplikatif.

3.6 Evaluasi Kritis terhadap Praktik Partisipatif Saat Ini

Praktik partisipatif dalam industri kelapa sawit telah mengalami perkembangan selama dua dekade terakhir, terutama setelah meningkatnya tekanan global terhadap isu keberlanjutan. Namun, keterlibatan generasi muda dalam

proses partisipatif masih bersifat marjinal dan cenderung seremonial. Banyak forum atau program CSR yang mengklaim melibatkan pemuda, namun tidak memberi ruang pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan kritik Arnstein (1969) mengenai partisipasi semu (tokenism) yang hanya berfungsi sebagai legitimasi formal. Evaluasi ini menunjukkan bahwa partisipasi yang tidak bermakna dapat merusak kepercayaan dan mereduksi motivasi keterlibatan.

Salah satu kelemahan utama dalam praktik partisipatif saat ini adalah dominasi aktor institusional, baik dari pihak perusahaan maupun pemerintah, dalam merancang dan mengendalikan agenda partisipasi. Program pelibatan sering kali bersifat top-down tanpa memahami konteks sosial dan aspirasi pemuda secara mendalam. Kegiatan pelatihan atau pertemuan komunitas lebih berorientasi pada sosialisasi kebijakan dibandingkan ruang dialog dua arah. Akibatnya, pemuda hanya dilibatkan sebagai penerima informasi, bukan sebagai penggagas atau mitra sejajar. Ketimpangan relasi ini menciptakan kesenjangan ekspektasi dan menurunkan efektivitas program.

Evaluasi terhadap forum-forum komunitas di wilayah Sumatera dan Kalimantan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil yang berhasil menciptakan ruang partisipatif inklusif. Kriteria keberhasilan mencakup keterbukaan terhadap usulan pemuda, akses terhadap pengambilan keputusan, dan mekanisme tindak lanjut yang

jelas. Sebaliknya, forum yang didominasi elite lokal cenderung mereproduksi struktur kekuasaan lama yang menyingkirkan pemuda dari proses strategis. Dalam kasus seperti ini, partisipasi menjadi instrumen politik, bukan medium pemberdayaan. Hal ini menunjukkan pentingnya desain kelembagaan yang adil dan transparan dalam membangun partisipasi yang efektif.

Hambatan partisipatif juga muncul dari dalam komunitas itu sendiri, seperti kurangnya kapasitas organisasi pemuda, rendahnya literasi kebijakan, dan lemahnya jejaring sosial. Banyak kelompok pemuda tidak memiliki struktur organisasi yang solid atau mekanisme internal untuk merumuskan agenda kolektif. Selain itu, mereka sering kesulitan mengakses informasi atau sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar. Dalam kondisi seperti ini, partisipasi menjadi reaktif dan sporadis, bukan proaktif dan strategis. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan menjadi prioritas dalam membenahan sistem partisipatif.

Di sisi lain, terdapat ketidakselarasan antara regulasi nasional mengenai partisipasi dan implementasinya di tingkat lokal. Misalnya, regulasi mengenai FPIC (Free, Prior and Informed Consent) belum sepenuhnya diterapkan dalam proses perluasan perkebunan atau kemitraan plasma. Prosedur konsultasi sering dilakukan secara cepat, minim dokumentasi, dan tanpa keterlibatan generasi muda sebagai pemangku kepentingan masa depan. Ketidakkonsistenan ini menciptakan ruang abu-abu yang menguntungkan aktor

dominan dan melemahkan posisi komunitas lokal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme akuntabilitas untuk menjamin bahwa prinsip partisipasi dijalankan sesuai dengan standar etis dan hukum.

Sebagian inisiatif inovatif telah muncul untuk menjawab tantangan tersebut, seperti koperasi pemuda, forum desa tematik, dan usaha sosial berbasis sawit. Namun, inisiatif ini masih terkendala oleh keberlanjutan pendanaan, keterbatasan dukungan kebijakan, dan isolasi antarwilayah. Tanpa dukungan lintas sektor dan kebijakan afirmatif, keberhasilan lokal akan sulit direplikasi secara luas. Evaluasi ini menggarisbawahi perlunya pendekatan sistemik yang melibatkan sektor pendidikan, keuangan, dan teknologi dalam mendukung partisipasi pemuda. Praktik yang baik perlu dikembangkan menjadi kebijakan nasional yang mendukung model manajemen partisipatif lintas skala.

Evaluasi kritis terhadap praktik partisipatif saat ini menunjukkan bahwa partisipasi generasi muda masih berada di tahap awal dan menghadapi hambatan struktural maupun kultural. Meskipun terdapat potensi besar, partisipasi pemuda belum menjadi bagian integral dari strategi keberlanjutan industri sawit. Diperlukan perubahan pendekatan dari partisipasi simbolis ke partisipasi transformatif yang berbasis pada keadilan sosial dan kepemimpinan generasi muda. Bab selanjutnya akan menyajikan rancangan model manajemen partisipatif yang menjawab tantangan ini dan menyatukan hasil temuan

lapangan ke dalam kerangka kerja strategis. Model tersebut diharapkan menjadi acuan untuk kebijakan dan praktik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

BAB 4: MODEL MANAJEMEN PARTISIPATIF UNTUK MENDUKUNG SUSTAINABILITY

4.1 Perancangan Model Manajemen Partisipatif

Model manajemen partisipatif yang diusulkan merupakan hasil integrasi antara teori partisipasi sosial, kapabilitas, dan sistem sosial-ekologis dengan temuan lapangan dari wilayah Sumatera dan Kalimantan. Tujuan utama model ini adalah menciptakan sistem pelibatan generasi muda yang sistematis, inklusif, dan kontekstual dalam industri kelapa sawit. Model ini terdiri dari tiga komponen inti: kapasitas aktor muda, struktur partisipatif, dan dukungan sistemik kelembagaan. Ketiga komponen ini dirancang untuk berinteraksi secara dinamis, sehingga membentuk sebuah siklus partisipasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, model ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi dapat dioperasionalkan secara praktis.

Proses perancangan model dilakukan dengan menggunakan pendekatan design-based research, yaitu pengembangan sistem berdasarkan interaksi antara teori dan praktik lapangan. Temuan dari studi kasus di Pelalawan, Seruyan, dan Sambas menjadi fondasi dalam merancang elemen-elemen model yang mampu menjawab hambatan partisipasi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Setiap komponen dirancang untuk menanggapi determinan utama: rendahnya akses terhadap informasi, kurangnya pengakuan formal, dan minimnya struktur partisipatif. Model ini juga dirancang fleksibel agar dapat diadaptasi ke

berbagai konteks sosial dan geografis. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan efektivitas pelibatan generasi muda dalam pengambilan keputusan dan penerapan prinsip keberlanjutan.

Komponen pertama adalah kapasitas aktor muda, yang mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan teknis, literasi kebijakan, dan kepemimpinan komunitas. Penguatan kapasitas ini dirancang melalui program pelatihan, mentoring, dan pengembangan jaringan pemuda lintas wilayah. Fokus pelatihan meliputi praktik sawit berkelanjutan, kewirausahaan sosial, advokasi kebijakan lokal, dan manajemen koperasi. Kapasitas yang kuat memungkinkan pemuda untuk berpartisipasi tidak hanya dalam kegiatan operasional, tetapi juga dalam formulasi strategi keberlanjutan industri. Dengan memperkuat sisi individu dan kolektif, model ini memulai transformasi dari dalam komunitas.

Komponen kedua adalah struktur partisipatif, yaitu wadah dan mekanisme formal yang menjamin keterlibatan generasi muda dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya meliputi forum desa tematik, koperasi pemuda, dan komite partisipatif di tingkat perusahaan atau pemerintah daerah. Struktur ini bertujuan mencegah keterlibatan semu dan membuka ruang representasi aktif dalam perencanaan dan evaluasi program industri. Keterlibatan yang terstruktur membantu meningkatkan akuntabilitas dan keterhubungan antara komunitas dan institusi pengelola. Dengan adanya ruang partisipatif ini,

kontribusi pemuda dapat tersalurkan secara strategis dan berdampak.

Komponen ketiga adalah dukungan sistemik kelembagaan, yang mencakup kebijakan afirmatif, pendanaan partisipatif, dan integrasi multipihak. Dukungan ini diperlukan untuk menjamin keberlanjutan dan replikasi model di berbagai daerah. Pemerintah, perusahaan, dan LSM diharapkan berperan sebagai fasilitator dan penyedia sumber daya, bukan pengendali tunggal. Model ini juga menekankan pentingnya mekanisme kolaboratif antarsektor agar program pemuda tidak berjalan secara terpisah-pisah. Dengan kerangka kerja yang terintegrasi, partisipasi generasi muda akan memperoleh legitimasi dan daya dorong kelembagaan.

Ketiga komponen dalam model ini terhubung dalam satu sistem siklus yang disebut Siklus Partisipasi Transformatif. Siklus ini terdiri dari empat tahap: (1) penguatan kapasitas, (2) fasilitasi ruang partisipatif, (3) implementasi aksi kolektif, dan (4) evaluasi dan refleksi. Setiap tahap melibatkan aktor muda secara aktif dengan dukungan dari pemangku kepentingan lain, sehingga proses partisipasi tidak terputus. Siklus ini mendorong keberlanjutan karena menghasilkan pembelajaran dan penyesuaian terus-menerus berdasarkan kondisi lapangan. Dengan pendekatan ini, model manajemen partisipatif menjadi alat transformasi sosial dan lingkungan.

4.2 Prinsip-Prinsip Dasar dalam Model yang Diusulkan

Model manajemen partisipatif yang diusulkan dalam Penulisan buku ini dibangun di atas enam prinsip dasar: inklusivitas, transparansi, kesetaraan, kapabilitas, kolaborasi, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini merupakan hasil integrasi antara teori partisipasi (Arnstein, 1969), teori kapabilitas (Sen, 1999), dan kerangka sistem sosial-ekologis (Ostrom, 2009). Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa model ini tidak hanya operasional, tetapi juga etis dan efektif dalam mendorong transformasi sosial. Setiap prinsip dirancang untuk menjawab masalah utama yang diidentifikasi dalam praktik partisipatif saat ini. Prinsip-prinsip ini juga bersifat adaptif, sehingga bisa diimplementasikan di berbagai konteks lokal industri kelapa sawit.

Prinsip pertama, inklusivitas, memastikan bahwa seluruh kelompok generasi muda – baik laki-laki maupun perempuan, dari berbagai latar pendidikan dan status ekonomi – memiliki akses yang setara terhadap proses partisipatif. Dalam banyak kasus, eksklusi terjadi karena bias sosial atau struktur hierarkis yang tidak membuka ruang bagi kelompok muda. Oleh karena itu, inklusivitas dalam model ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga diwujudkan dalam aturan representasi dan desain program yang responsif terhadap kebutuhan marjinal. Forum komunitas, kelompok tani muda, dan koperasi pemuda harus dirancang untuk mengakomodasi keragaman aktor. Dengan prinsip ini, partisipasi menjadi medium pemerataan dan keadilan sosial.

Prinsip kedua adalah transparansi, yang merujuk pada kejelasan informasi, keterbukaan proses, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Generasi muda sering kali terpinggirkan karena tidak memiliki akses terhadap informasi teknis, keuangan, atau kebijakan yang berkaitan dengan industri sawit. Dalam model ini, transparansi dijalankan melalui mekanisme komunikasi dua arah, penyediaan data publik, serta pelaporan berkala oleh institusi pengelola. Teknologi digital seperti platform partisipatif atau aplikasi komunitas dapat dimanfaatkan untuk memperluas transparansi di wilayah terpencil. Dengan transparansi, partisipasi akan memiliki dasar kepercayaan yang kuat antara pemuda, pemerintah, dan perusahaan.

Prinsip ketiga adalah kesetaraan, yang menekankan distribusi kekuasaan yang adil dalam proses pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, dominasi elite lokal atau manajemen perusahaan sering menghambat keterlibatan sejati generasi muda. Oleh karena itu, model ini mensyaratkan adanya perwakilan pemuda dalam struktur kelembagaan industri atau komunitas. Kesetaraan juga menyangkut pengakuan terhadap pengalaman dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh generasi muda, terutama mereka yang tumbuh dalam keluarga petani. Dengan prinsip kesetaraan, partisipasi menjadi proses kolaboratif, bukan sekadar pelengkap formal.

Prinsip keempat, kapabilitas, merujuk pada kemampuan individu untuk memilih dan bertindak sesuai nilai yang mereka anggap bermakna (Sen, 1999). Dalam konteks ini, partisipasi bukan hanya soal kehadiran fisik, tetapi juga soal kesiapan intelektual, teknis, dan emosional. Model ini mengharuskan adanya program penguatan kapasitas secara berkelanjutan, termasuk pelatihan kewirausahaan, literasi kebijakan, dan manajemen kolektif. Dengan memperluas kapabilitas, generasi muda dapat berkontribusi secara otonom dan tidak tergantung pada elite. Prinsip ini memastikan bahwa partisipasi bukan hanya hak, tetapi juga kemampuan yang dapat dibangun.

Prinsip kelima adalah kolaborasi, yang berarti partisipasi harus dilakukan dalam kerangka kemitraan lintas sektor antara pemuda, pemerintah, perusahaan, dan lembaga masyarakat sipil. Kolaborasi menciptakan sinergi sumber daya, memperkuat legitimasi, dan mempercepat proses adopsi perubahan. Dalam model ini, kolaborasi dilakukan melalui platform multipihak yang difasilitasi secara netral dan terbuka. Setiap aktor memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung keberlanjutan industri sawit. Prinsip ini menghindari pendekatan silo dan memastikan bahwa tanggung jawab dibagi secara proporsional.

Prinsip terakhir adalah keberlanjutan, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Model ini bertujuan tidak hanya untuk menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi untuk membangun sistem partisipatif yang bertahan

dalam jangka panjang. Keberlanjutan sosial dicapai melalui regenerasi kepemimpinan pemuda, ekonomi melalui diversifikasi usaha, dan lingkungan melalui adopsi praktik pertanian yang lestari. Evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan menjadi elemen penting agar model dapat berkembang sesuai tantangan yang berubah. Prinsip ini memastikan bahwa partisipasi tidak berhenti pada proyek, melainkan menjadi bagian dari tata kelola industri sawit yang terus hidup.

4.3 Strategi Penerapan Model di Industri Kelapa Sawit

Strategi penerapan model manajemen partisipatif pada generasi muda dirancang dalam tiga tahapan utama: preparasi, pelaksanaan, dan evaluasi adaptif. Setiap tahapan melibatkan aktor-aktor kunci secara aktif dan menyesuaikan dengan kondisi sosial-ekologis lokal. Tahap preparasi mencakup pemetaan komunitas, identifikasi pemuda potensial, dan pembentukan kelompok kerja lintas sektor. Strategi ini dimulai dari proses fasilitasi dan dialog komunitas untuk memastikan bahwa inisiatif lahir dari kebutuhan nyata. Pendekatan berbasis komunitas bertujuan untuk membangun rasa memiliki sejak awal proses partisipatif.

Langkah awal dalam tahap preparasi adalah melakukan pemetaan sosial dengan pendekatan partisipatif, seperti metode Participatory Rural Appraisal (PRA). Metode ini memungkinkan generasi muda ikut serta dalam mengidentifikasi permasalahan, peluang, dan aktor kunci di lingkungan mereka. Hasil pemetaan akan digunakan

sebagai dasar penyusunan program yang sesuai konteks lokal. Selain itu, penentuan indikator lokal untuk mengukur partisipasi dan keberlanjutan sangat penting dilakukan sejak tahap awal. Proses ini memperkuat transparansi dan memberi arah pada pengembangan intervensi berbasis data.

Tahap kedua adalah pelaksanaan, yang berfokus pada implementasi program pelibatan generasi muda melalui lima intervensi utama: pelatihan teknis, penguatan kelembagaan pemuda, penciptaan ruang partisipatif, inkubasi kewirausahaan, dan kolaborasi multipihak. Pelatihan mencakup teknik budidaya sawit berkelanjutan, literasi digital, manajemen usaha, dan advokasi kebijakan. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui pembentukan koperasi pemuda, forum desa, atau unit usaha komunitas. Ruang partisipatif perlu difasilitasi dalam bentuk forum mingguan, musyawarah desa, atau komite lokal yang melibatkan perwakilan pemuda. Inisiatif ini dapat dimodifikasi sesuai dengan kapasitas dan budaya lokal masing-masing wilayah.

Inkubasi kewirausahaan pemuda menjadi strategi kunci dalam menciptakan keterlibatan jangka panjang. Melalui program ini, generasi muda dibimbing dalam mengembangkan usaha berbasis sawit yang ramah lingkungan, seperti pengolahan limbah, produk bernilai tambah, dan jasa ekowisata. Inkubasi juga dapat didukung oleh inkubator bisnis kampus, BUMDes, atau LSM dengan orientasi sosial. Pendanaan awal bisa berasal dari dana desa, CSR perusahaan, atau skema pembiayaan mikro

pemerintah seperti KUR hijau. Dukungan finansial yang terstruktur akan memperkuat keberlanjutan dan motivasi pemuda dalam membangun usahanya.

Kolaborasi multipihak menjadi fondasi strategi pelaksanaan model agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah desa, perusahaan perkebunan, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil perlu duduk bersama dalam menyusun peran dan tanggung jawab masing-masing. Pembentukan Forum Kemitraan Sawit Inklusif di tingkat kabupaten dapat menjadi wadah koordinasi kebijakan dan pertukaran praktik baik. Perusahaan memiliki peran strategis sebagai mitra fasilitator, bukan dominator, dalam pelibatan komunitas muda. Dengan pendekatan kolaboratif, sinergi antara sektor publik, swasta, dan komunitas dapat mempercepat pencapaian tujuan keberlanjutan.

Tahap ketiga adalah evaluasi adaptif, yang dilakukan secara berkala untuk menilai keberhasilan dan menyesuaikan strategi sesuai dinamika lapangan. Evaluasi mencakup indikator kuantitatif seperti tingkat keikutsertaan pemuda, jumlah usaha baru, serta kualitas interaksi kelembagaan. Aspek kualitatif meliputi perubahan persepsi, penguatan kepercayaan sosial, dan pergeseran nilai dalam komunitas. Metode yang digunakan dapat berupa survei, wawancara mendalam, dan penilaian partisipatif bersama masyarakat. Hasil evaluasi akan menjadi umpan balik dalam pengembangan model yang lebih responsif.

Secara keseluruhan, strategi penerapan model ini menekankan proses yang inklusif, bertahap, dan berbasis pembelajaran. Tidak ada satu pendekatan tunggal yang cocok untuk semua wilayah, sehingga fleksibilitas dan penyesuaian lokal sangat ditekankan. Dengan strategi pelaksanaan yang sistematis dan partisipatif, diharapkan generasi muda tidak hanya menjadi objek program, tetapi juga subjek transformasi industri. Bab selanjutnya akan membahas peran para pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan implementasi model ini. Kolaborasi antarsektor menjadi jembatan penting agar strategi yang dirancang dapat berjalan secara berkelanjutan.

4.4 Peran Stakeholder: Pemerintah, Swasta, LSM, dan Komunitas

Keberhasilan implementasi model manajemen partisipatif sangat bergantung pada sinergi antara empat kelompok pemangku kepentingan utama: pemerintah, sektor swasta (perusahaan kelapa sawit), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal, khususnya generasi muda. Setiap pihak memiliki mandat, kapasitas, dan kepentingan yang berbeda, namun dapat saling melengkapi dalam mendukung partisipasi yang bermakna. Model ini menekankan bahwa tidak ada satu aktor yang bisa bekerja sendiri tanpa keterlibatan yang lain. Kolaborasi antarsektor menjadi fondasi strategis dalam membangun sistem partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan peran yang jelas dan koordinasi yang efektif, proses transformasi dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Pemerintah, baik di tingkat desa, kabupaten, maupun nasional, memiliki peran penting dalam menciptakan kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung keterlibatan pemuda. Pemerintah desa dapat memfasilitasi pembentukan forum pemuda, menyediakan ruang musyawarah, serta mengalokasikan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mendukung pelatihan, memberikan izin usaha kecil, dan mengintegrasikan model ini ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Di tingkat nasional, kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Bappenas dapat merumuskan kebijakan afirmatif yang mendukung regenerasi petani dan wirausaha muda di sektor sawit. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan lintas sektor, peluang partisipasi dapat ditingkatkan secara struktural.

Sektor swasta, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit, memiliki tanggung jawab sosial dan operasional dalam membuka ruang partisipatif bagi generasi muda. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan kemitraan plasma, perusahaan dapat memberikan akses pelatihan, modal usaha, dan ruang dialog. Perusahaan juga dapat melibatkan pemuda dalam pengawasan lingkungan, pengembangan produk turunan, serta kegiatan konservasi berbasis masyarakat. Namun, peran ini harus dilakukan secara transparan dan tidak manipulatif agar partisipasi bersifat sejati, bukan sekadar

formalitas. Ketika perusahaan mengadopsi prinsip inklusif dan keberlanjutan, mereka akan memperoleh legitimasi sosial dan memperkuat stabilitas operasional.

LSM dan organisasi masyarakat sipil memiliki kekuatan dalam membangun kapasitas, mendorong kesadaran kritis, dan menjembatani kepentingan antara komunitas dan aktor institusional. Peran mereka sangat penting dalam memfasilitasi proses dialog, memberikan pelatihan teknis dan advokasi, serta melakukan pemantauan terhadap praktik keberlanjutan. LSM juga dapat menjadi katalis dalam menciptakan jaringan pemuda antarwilayah dan antarsektor. Keberadaan mereka sangat membantu komunitas pemuda yang belum memiliki pengalaman dalam organisasi atau advokasi. Dengan posisi sebagai pihak ketiga yang relatif independen, LSM berperan sebagai penjaga integritas proses partisipatif.

Komunitas lokal, khususnya kelompok pemuda, adalah inti dari model partisipatif ini. Peran mereka bukan sekadar peserta program, tetapi sebagai pengambil inisiatif, pelaksana, dan evaluator dari aktivitas partisipatif yang berlangsung. Komunitas pemuda dapat membentuk koperasi, forum desa, atau kelompok usaha sosial yang menjadi tulang punggung transformasi lokal. Namun, peran ini membutuhkan penguatan dari sisi kepemimpinan, manajemen organisasi, dan kemampuan membangun jaringan eksternal. Ketika diberi ruang dan dukungan, pemuda terbukti mampu menghasilkan inovasi dan perubahan nyata di tingkat akar rumput.

Interaksi antarpemangku kepentingan perlu difasilitasi secara terstruktur melalui mekanisme koordinasi reguler, seperti forum multipihak atau joint task force di tingkat kabupaten. Forum ini bertujuan menyusun rencana aksi bersama, menyelaraskan program antarinstansi, serta menyelesaikan konflik atau ketidaksepahaman yang muncul. Koordinasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya dari berbagai aktor digunakan secara sinergis, tidak tumpang tindih atau saling mengabaikan. Dalam konteks ini, keberadaan fasilitator netral seperti universitas atau lembaga riset dapat memperkuat objektivitas proses kolaborasi. Keterbukaan komunikasi dan dokumentasi yang transparan menjadi prinsip utama dalam tata kelola multipihak.

Secara keseluruhan, pembagian peran yang jelas dan saling melengkapi antar-stakeholder menjadi kunci keberhasilan model manajemen partisipatif. Tanpa peran aktif dari pemerintah, perusahaan, LSM, dan komunitas, upaya mendorong partisipasi generasi muda akan bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Bab selanjutnya akan membahas indikator keberhasilan implementasi model ini, sebagai alat ukur dan dasar evaluasi program. Dengan instrumen evaluatif yang tepat, kontribusi masing-masing aktor dapat dinilai secara objektif dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Kolaborasi strategis dan pembelajaran bersama akan menjamin bahwa model ini mampu menjawab tantangan industri sawit secara nyata.

4.4 Peran Stakeholder: Pemerintah, Swasta, LSM, dan Komunitas

Keberhasilan implementasi model manajemen partisipatif sangat bergantung pada sinergi antara empat kelompok pemangku kepentingan utama: pemerintah, sektor swasta (perusahaan kelapa sawit), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal, khususnya generasi muda. Setiap pihak memiliki mandat, kapasitas, dan kepentingan yang berbeda, namun dapat saling melengkapi dalam mendukung partisipasi yang bermakna. Model ini menekankan bahwa tidak ada satu aktor yang bisa bekerja sendiri tanpa keterlibatan yang lain. Kolaborasi antarsektor menjadi fondasi strategis dalam membangun sistem partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan peran yang jelas dan koordinasi yang efektif, proses transformasi dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Pemerintah, baik di tingkat desa, kabupaten, maupun nasional, memiliki peran penting dalam menciptakan kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung keterlibatan pemuda. Pemerintah desa dapat memfasilitasi pembentukan forum pemuda, menyediakan ruang musyawarah, serta mengalokasikan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mendukung pelatihan, memberikan izin usaha kecil, dan mengintegrasikan model ini ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Di tingkat nasional, kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Bappenas dapat merumuskan kebijakan afirmatif yang

mendukung regenerasi petani dan wirausaha muda di sektor sawit. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan lintas sektor, peluang partisipasi dapat ditingkatkan secara struktural.

Sektor swasta, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit, memiliki tanggung jawab sosial dan operasional dalam membuka ruang partisipatif bagi generasi muda. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan kemitraan plasma, perusahaan dapat memberikan akses pelatihan, modal usaha, dan ruang dialog. Perusahaan juga dapat melibatkan pemuda dalam pengawasan lingkungan, pengembangan produk turunan, serta kegiatan konservasi berbasis masyarakat. Namun, peran ini harus dilakukan secara transparan dan tidak manipulatif agar partisipasi bersifat sejati, bukan sekadar formalitas. Ketika perusahaan mengadopsi prinsip inklusif dan keberlanjutan, mereka akan memperoleh legitimasi sosial dan memperkuat stabilitas operasional.

LSM dan organisasi masyarakat sipil memiliki kekuatan dalam membangun kapasitas, mendorong kesadaran kritis, dan menjembatani kepentingan antara komunitas dan aktor institusional. Peran mereka sangat penting dalam memfasilitasi proses dialog, memberikan pelatihan teknis dan advokasi, serta melakukan pemantauan terhadap praktik keberlanjutan. LSM juga dapat menjadi katalis dalam menciptakan jaringan pemuda antarwilayah dan antarsektor. Keberadaan mereka sangat membantu komunitas pemuda yang belum memiliki

pengalaman dalam organisasi atau advokasi. Dengan posisi sebagai pihak ketiga yang relatif independen, LSM berperan sebagai penjaga integritas proses partisipatif.

Komunitas lokal, khususnya kelompok pemuda, adalah inti dari model partisipatif ini. Peran mereka bukan sekadar peserta program, tetapi sebagai pengambil inisiatif, pelaksana, dan evaluator dari aktivitas partisipatif yang berlangsung. Komunitas pemuda dapat membentuk koperasi, forum desa, atau kelompok usaha sosial yang menjadi tulang punggung transformasi lokal. Namun, peran ini membutuhkan penguatan dari sisi kepemimpinan, manajemen organisasi, dan kemampuan membangun jaringan eksternal. Ketika diberi ruang dan dukungan, pemuda terbukti mampu menghasilkan inovasi dan perubahan nyata di tingkat akar rumput.

Interaksi antarpemangku kepentingan perlu difasilitasi secara terstruktur melalui mekanisme koordinasi reguler, seperti forum multipihak atau joint task force di tingkat kabupaten. Forum ini bertujuan menyusun rencana aksi bersama, menelaraskan program antarinstansi, serta menyelesaikan konflik atau ketidaksepahaman yang muncul. Koordinasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya dari berbagai aktor digunakan secara sinergis, tidak tumpang tindih atau saling mengabaikan. Dalam konteks ini, keberadaan fasilitator netral seperti universitas atau lembaga riset dapat memperkuat objektivitas proses kolaborasi. Keterbukaan komunikasi dan

dokumentasi yang transparan menjadi prinsip utama dalam tata kelola multipihak.

Secara keseluruhan, pembagian peran yang jelas dan saling melengkapi antar-stakeholder menjadi kunci keberhasilan model manajemen partisipatif. Tanpa peran aktif dari pemerintah, perusahaan, LSM, dan komunitas, upaya mendorong partisipasi generasi muda akan bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Bab selanjutnya akan membahas indikator keberhasilan implementasi model ini, sebagai alat ukur dan dasar evaluasi program. Dengan instrumen evaluatif yang tepat, kontribusi masing-masing aktor dapat dinilai secara objektif dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Kolaborasi strategis dan pembelajaran bersama akan menjamin bahwa model ini mampu menjawab tantangan industri sawit secara nyata.

4.5 Indikator Keberhasilan Implementasi Model

Keberhasilan implementasi model manajemen partisipatif perlu diukur secara sistematis melalui indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Indikator-indikator ini harus dirancang agar mampu mengukur pencapaian pada tiga dimensi utama: partisipasi generasi muda, penguatan kelembagaan, dan dampak terhadap keberlanjutan. Dengan indikator yang terukur dan relevan, pemangku kepentingan dapat memantau progres, mengidentifikasi hambatan, dan melakukan perbaikan strategi secara berkala. Proses evaluasi ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan keberlangsungan model dalam jangka panjang. Oleh karena itu, indikator harus disusun

62 | Model Manajemen Partisipatif pada Generasi Muda dalam Mendukung Sustainability Industri Kelapa Sawit

berdasarkan prinsip transparansi, relevansi lokal, dan keterlibatan multipihak.

Indikator pertama adalah tingkat keterlibatan generasi muda dalam kegiatan industri sawit yang terkait dengan keberlanjutan. Ini mencakup jumlah pemuda yang aktif dalam koperasi, forum komunitas, pelatihan, dan program CSR perusahaan. Pengukuran dapat dilakukan melalui persentase partisipasi dari total populasi usia muda di wilayah tersebut. Selain kuantitas, indikator juga harus menilai kualitas partisipasi, seperti sejauh mana pemuda terlibat dalam pengambilan keputusan dan merancang kegiatan. Indikator ini menggambarkan efektivitas proses rekrutmen dan keterbukaan struktur partisipatif yang telah dibentuk.

Indikator kedua adalah penguatan kapasitas individu dan organisasi pemuda, yang mencakup peningkatan pengetahuan teknis, kepemimpinan, literasi kebijakan, dan kemampuan manajerial. Pengukuran dilakukan melalui pre- and post-assessment dalam pelatihan, sertifikasi keterampilan, serta keberhasilan organisasi pemuda dalam merancang dan mengelola kegiatan mandiri. Jumlah pelatihan yang diikuti, keberhasilan program inkubasi usaha, dan akses ke pendanaan juga menjadi indikator penting. Evaluasi ini bertujuan mengukur transformasi dari partisipan pasif menjadi aktor aktif dan kompeten. Dengan begitu, partisipasi tidak hanya simbolis, tetapi juga berdampak.

Indikator ketiga adalah kinerja kelembagaan dan koordinasi multipihak. Ini meliputi jumlah pertemuan rutin antara pemangku kepentingan, keberadaan rencana aksi bersama, dan mekanisme resolusi konflik yang berjalan. Indikator ini penting karena menunjukkan sejauh mana model partisipatif telah terintegrasi ke dalam sistem kelembagaan lokal. Kinerja kelembagaan juga bisa diukur dari jumlah kebijakan atau regulasi desa yang menyertakan pemuda sebagai aktor penting. Ketika koordinasi lintas sektor berjalan efektif, keberlanjutan model dapat dijamin dengan lebih baik.

Indikator keempat adalah dampak ekonomi dari keterlibatan generasi muda, yang mencakup pertumbuhan unit usaha baru, peningkatan pendapatan pemuda, dan penyerapan tenaga kerja dari kelompok usia muda. Data ini dapat diperoleh melalui survei ekonomi rumah tangga, laporan keuangan koperasi, atau pelacakan usaha yang lahir dari program inkubasi. Pertumbuhan ekonomi lokal yang berbasis partisipasi generasi muda menjadi bukti bahwa keberlanjutan juga dapat memberi manfaat langsung. Selain itu, indikator ini memperkuat legitimasi program di mata masyarakat dan pemangku kepentingan. Ketika kontribusi ekonomi terlihat, kepercayaan terhadap model akan meningkat.

Indikator kelima adalah perubahan perilaku dan kesadaran terhadap keberlanjutan, baik pada individu maupun komunitas. Hal ini dapat dinilai dari adopsi praktik pertanian ramah lingkungan, peningkatan inisiatif

konservasi, serta keterlibatan pemuda dalam kampanye lingkungan. Penilaian dapat dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan penilaian partisipatif berbasis komunitas. Indikator ini penting karena keberlanjutan bukan hanya soal hasil, tetapi juga proses perubahan budaya dan nilai. Ketika kesadaran meningkat, praktik berkelanjutan akan bertahan lebih lama dan tersebar lebih luas.

Untuk memastikan akurasi dan kredibilitas, pengukuran indikator dilakukan secara periodik setiap 6 atau 12 bulan. Evaluasi dilakukan oleh tim lintas sektor yang terdiri dari perwakilan komunitas pemuda, pemerintah desa, LSM, dan akademisi lokal. Metodologi evaluasi dapat mencakup kuisisioner, FGD, studi kasus, serta analisis dokumentasi kegiatan. Dengan pendekatan evaluatif yang partisipatif, hasil penilaian akan lebih diterima dan dijadikan dasar untuk perbaikan kolektif. Evaluasi tidak dilihat sebagai kontrol, tetapi sebagai proses pembelajaran bersama.

5.6 Simulasi dan Uji Validitas Model

Simulasi model dilakukan sebagai langkah awal untuk menguji kelayakan dan efektivitas pendekatan manajemen partisipatif sebelum diterapkan secara luas. Proses ini melibatkan implementasi terbatas model di dua lokasi uji coba: Desa Makmur Jaya (Pelalawan, Riau) dan Desa Tumbang Mangkutup (Seruyan, Kalimantan Tengah). Pemilihan lokasi didasarkan pada kesiapan komunitas, dukungan kelembagaan lokal, serta keberadaan kelompok

pemuda yang telah aktif secara sosial. Simulasi dilakukan selama empat bulan dan mencakup semua tahapan model: penguatan kapasitas, fasilitasi ruang partisipatif, implementasi aksi kolektif, dan evaluasi reflektif. Hasil simulasi menjadi dasar untuk menguji validitas dan menyesuaikan model secara kontekstual.

Dalam proses simulasi, digunakan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya, meliputi partisipasi, kapasitas, kelembagaan, dampak ekonomi, dan perubahan perilaku. Di Pelalawan, koperasi pemuda difasilitasi untuk menyusun rencana bisnis berbasis sawit berkelanjutan, sementara di Seruyan, forum pemuda dilibatkan dalam revisi peraturan desa tentang tata guna lahan. Kedua lokasi menunjukkan peningkatan partisipasi pemuda dalam musyawarah desa dan perencanaan kegiatan komunitas. Responden menyatakan bahwa keterlibatan mereka terasa lebih bermakna karena diberikan ruang bicara dan keputusan. Hal ini menjadi indikator awal bahwa model mampu membangun rasa kepemilikan (*sense of ownership*).

Uji validitas dilakukan menggunakan pendekatan triangulasi data, yaitu menggabungkan hasil kuantitatif survei, observasi lapangan, dan wawancara mendalam. Dari 120 responden di kedua lokasi simulasi, sebanyak 78% menyatakan puas terhadap mekanisme partisipasi yang dibangun, dan 65% menyatakan ada peningkatan pemahaman tentang keberlanjutan. Analisis dokumentasi menunjukkan bahwa 4 dari 6 kegiatan yang dirancang oleh

pemuda berhasil dijalankan secara mandiri. Data ini mengindikasikan bahwa model memiliki construct validity—yaitu bahwa model tersebut mengukur dan mencapai apa yang memang ingin dicapai. Hasil ini juga menunjukkan adanya relevansi tinggi antara desain model dan kebutuhan komunitas.

Selain validitas isi dan konstruk, dilakukan pula pengujian face validity melalui diskusi kelompok terarah (FGD) dengan pemuda, perangkat desa, dan perwakilan perusahaan. Mayoritas peserta menyatakan bahwa struktur model mudah dipahami, realistis, dan dapat direplikasi. Namun, ada masukan bahwa keberhasilan sangat tergantung pada komitmen fasilitator lokal dan kesinambungan dukungan dari luar. Berdasarkan hal ini, disimpulkan bahwa model memiliki face validity yang baik, tetapi tetap membutuhkan adaptasi lokal dalam pelaksanaannya. Masukan dari FGD digunakan untuk menyempurnakan panduan operasional model.

Beberapa tantangan yang muncul selama simulasi antara lain keterbatasan waktu pelatihan, kesulitan mengakses dana awal, dan dinamika politik desa yang mempengaruhi konsistensi program. Tantangan ini menjadi pelajaran penting dalam menyusun protokol mitigasi risiko pada implementasi di masa depan. Pendekatan reflektif-adaptif perlu menjadi bagian dari sistem manajemen model agar mampu menanggapi hambatan secara cepat dan relevan. Oleh karena itu, simulasi tidak hanya menjadi sarana uji coba, tetapi juga sarana untuk belajar dan

memperbaiki model secara terus menerus. Fleksibilitas menjadi kunci agar model dapat bertahan di berbagai konteks.

Langkah selanjutnya dalam uji validitas adalah memperluas skala implementasi dan melakukan pengujian longitudinal. Pengujian ini bertujuan untuk menilai konsistensi model dalam jangka waktu lebih lama dan dalam kondisi sosial yang berbeda. Dengan memperluas jumlah lokasi dan responden, uji validitas eksternal dapat dilakukan secara lebih kuat. Jika hasilnya konsisten, model ini dapat direkomendasikan sebagai kerangka kerja nasional dalam pelibatan generasi muda di industri sawit. Validasi berkelanjutan ini diperlukan agar model tidak stagnan dan tetap relevan dengan perubahan kondisi lapangan.

Dengan hasil simulasi dan uji validitas awal yang menjanjikan, model manajemen partisipatif berbasis generasi muda ini dinilai layak untuk diimplementasikan secara lebih luas. Namun, pendekatan bertahap dan berbasis pembelajaran tetap diperlukan agar proses adopsi berjalan secara kontekstual dan inklusif. Bab selanjutnya akan merangkum temuan utama dari seluruh studi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai bagi pemangku kepentingan. Dengan kerangka yang teruji, partisipasi generasi muda dapat menjadi pilar keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia. Implementasi yang tepat akan membawa dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan bagi masa depan industri ini.

BAB 5: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Ringkasan Temuan Utama

Penulisan buku ini bertujuan merancang dan menguji model manajemen partisipatif yang dapat meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa tingkat partisipasi generasi muda masih rendah dan lebih banyak terjadi di level operasional, bukan strategis. Hambatan utama mencakup akses informasi yang terbatas, minimnya pelatihan dan ruang partisipasi, serta persepsi negatif terhadap industri sawit. Namun demikian, terdapat kelompok pemuda yang memiliki motivasi kuat dan potensi tinggi untuk menjadi agen perubahan. Potensi ini dapat dimaksimalkan jika difasilitasi melalui pendekatan yang sistematis, kolaboratif, dan kontekstual.

Model manajemen partisipatif yang dikembangkan mengintegrasikan prinsip inklusivitas, transparansi, kesetaraan, kapabilitas, kolaborasi, dan keberlanjutan. Model ini terdiri dari tiga komponen utama: penguatan kapasitas generasi muda, struktur partisipatif, dan dukungan sistemik kelembagaan. Simulasi di dua wilayah menunjukkan bahwa model ini mampu meningkatkan partisipasi pemuda dalam pengambilan keputusan dan praktik keberlanjutan. Uji validitas menunjukkan hasil yang positif baik dari sisi pemahaman, keterlibatan, hingga

dampak sosial. Dengan demikian, model ini terbukti layak dan relevan untuk dikembangkan lebih luas di wilayah lain.

Temuan dari studi kasus di Sumatera dan Kalimantan menunjukkan bahwa konteks lokal sangat memengaruhi bentuk dan efektivitas partisipasi. Di wilayah dengan dukungan kelembagaan dan organisasi pemuda yang kuat, partisipasi lebih bermakna dan berdampak. Sebaliknya, di wilayah yang minim fasilitas dan didominasi oleh kekuatan perusahaan, keterlibatan pemuda cenderung simbolik. Oleh karena itu, adaptasi lokal menjadi kunci utama dalam implementasi model. Tidak ada satu pendekatan tunggal yang dapat diterapkan secara seragam di seluruh wilayah.

Evaluasi terhadap praktik partisipatif saat ini menunjukkan adanya celah antara retorika partisipasi dan praktik nyata di lapangan. Banyak program hanya bersifat seremonial dan tidak memberikan ruang pengaruh nyata bagi generasi muda. Rendahnya literasi kelembagaan dan ketiadaan mekanisme representasi formal juga menjadi faktor penghambat. Hal ini menegaskan bahwa perubahan paradigma dari partisipasi simbolik ke partisipasi transformatif sangat dibutuhkan. Perubahan ini memerlukan dukungan kebijakan yang kuat dan partisipasi multipihak yang sejajar.

Strategi implementasi model melibatkan tiga tahap utama: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi adaptif. Tiap tahap dirancang untuk melibatkan aktor lokal, memperkuat

kapasitas, dan membangun sistem koordinasi yang terbuka. Penguatan kelembagaan, inkubasi kewirausahaan, dan forum multipihak menjadi strategi penting dalam memperluas partisipasi pemuda. Indikator keberhasilan model meliputi keterlibatan aktif, peningkatan kapasitas, kontribusi ekonomi, perubahan perilaku, dan sinergi kelembagaan. Evaluasi berkala dan refleksi kolektif menjadi mekanisme untuk memastikan keberlanjutan model.

Secara keseluruhan, Penulisan buku ini membuktikan bahwa partisipasi generasi muda bukan hanya mungkin, tetapi juga sangat strategis bagi masa depan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Namun, partisipasi ini tidak akan terjadi secara alami tanpa intervensi sistemik yang membuka ruang, membangun kapasitas, dan memperkuat insentif. Model manajemen partisipatif yang dirancang telah terbukti adaptif, aplikatif, dan relevan dengan konteks lokal Indonesia. Diperlukan kemauan politik, dukungan kelembagaan, dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Model ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan industri sawit yang inklusif dan berkeadilan.

5.2 Implikasi Akademik dan Praktis

Dari sisi akademik, Penulisan buku ini memberikan kontribusi terhadap literatur partisipasi dan keberlanjutan di sektor agribisnis, khususnya yang berfokus pada generasi muda. Model teoritis yang dikembangkan menggabungkan pendekatan multi-disiplin, termasuk teori partisipasi sosial,

kapabilitas, dan sistem sosial-ekologis. Studi ini juga memperluas pemahaman mengenai dinamika partisipasi lintas generasi dan hubungan antara nilai, persepsi, dan tindakan kolektif. Dengan pendekatan empiris dan berbasis data lapangan, temuan ini dapat menjadi dasar bagi Penulisan buku lanjutan di bidang pembangunan partisipatif. Selain itu, metode evaluasi model ini dapat diadaptasi untuk sektor lain di luar kelapa sawit.

Implikasi praktis dari Penulisan buku ini sangat luas, terutama bagi para pembuat kebijakan, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah dapat menggunakan model ini untuk menyusun program regenerasi petani muda dan revitalisasi komunitas sawit. Perusahaan sawit dapat mengintegrasikan model ini ke dalam strategi CSR dan kemitraan plasma untuk meningkatkan legitimasi sosial. LSM dan universitas dapat memanfaatkannya sebagai alat pelatihan, pemberdayaan, dan monitoring partisipatif. Dengan adopsi yang tepat, model ini dapat menjembatani kesenjangan antara generasi muda dan sistem industri yang selama ini bersifat hierarkis dan eksklusif.

5.3 Rekomendasi Kebijakan untuk Pemerintah dan Industri

Rekomendasi pertama ditujukan kepada pemerintah pusat dan daerah, yaitu perlunya penyusunan kebijakan afirmatif untuk mendorong keterlibatan generasi muda dalam industri kelapa sawit secara sistemik. Pemerintah perlu mengintegrasikan agenda regenerasi petani dan

partisipasi pemuda ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD provinsi maupun kabupaten. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan kewirausahaan hijau, insentif pajak usaha pemuda, dan skema pembiayaan agribisnis khusus generasi muda. Selain itu, pengembangan desa sawit berkelanjutan dapat mencantumkan indikator keterlibatan pemuda sebagai syarat pencairan dana. Kebijakan ini akan memperkuat posisi pemuda sebagai aktor pembangunan, bukan hanya penerima manfaat.

Kedua, perlu dikeluarkan regulasi teknis oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mendorong penggunaan dana desa dan pendampingan teknis bagi organisasi pemuda sektor sawit. Dana desa dapat dimanfaatkan untuk mendanai pembentukan koperasi pemuda, forum sawit hijau, atau program pelatihan kolaboratif berbasis komunitas. Agar efektif, peraturan teknis tersebut harus memuat standar akuntabilitas, monitoring, dan pelaporan kegiatan partisipatif. Perlu juga ditetapkan insentif bagi desa yang berhasil mendorong inovasi pemuda dalam pengelolaan kelapa sawit secara lestari. Dengan dukungan regulasi dan pembiayaan desa, ruang gerak pemuda akan lebih luas dan berdaya guna.

Ketiga, pemerintah daerah di wilayah sentra sawit perlu membentuk Forum Kemitraan Multipihak yang secara reguler mempertemukan perwakilan pemuda, perusahaan,

pemerintah, dan LSM. Forum ini bertugas mengidentifikasi isu strategis lokal, menyusun agenda kolaboratif, dan memantau implementasi model manajemen partisipatif. Forum semacam ini harus difasilitasi secara independen dan diberikan kewenangan untuk mengusulkan kebijakan daerah berbasis hasil evaluasi lapangan. Dengan pendekatan ini, sinergi lintas sektor akan terbangun dan kebijakan tidak bersifat top-down. Mekanisme dialog reguler juga akan memperkuat kepercayaan dan transparansi antara aktor-aktor kunci.

Keempat, perusahaan perkebunan kelapa sawit perlu merevisi pendekatan Corporate Social Responsibility (CSR) agar lebih inklusif dan transformatif terhadap generasi muda. Program CSR tidak cukup hanya berwujud bantuan finansial atau kegiatan sosial tahunan, tetapi harus terintegrasi dalam strategi bisnis berkelanjutan. Perusahaan dapat membentuk unit khusus pemberdayaan pemuda, memberikan akses lahan plasma mini, atau mendukung inkubasi usaha sosial berbasis sawit. Keterlibatan pemuda dalam sistem pemantauan lingkungan, pelatihan pertanian presisi, dan pengembangan produk inovatif akan meningkatkan legitimasi sosial perusahaan. Dengan transformasi pendekatan CSR, perusahaan akan mendapatkan manfaat reputasi sekaligus stabilitas operasional jangka panjang.

Kelima, lembaga pendidikan dan riset, termasuk universitas lokal dan politeknik pertanian, disarankan untuk mengembangkan kurikulum berbasis agroekologi

sawit dan kewirausahaan hijau. Institusi ini dapat menjadi mitra dalam penguatan kapasitas pemuda melalui pendidikan vokasional, Penulisan buku terapan, dan program KKN tematik di desa sawit. Kemitraan antara kampus dan komunitas desa akan memperluas ruang belajar bersama dan mempercepat penyebaran inovasi partisipatif. Dosen dan mahasiswa dapat berperan sebagai fasilitator dalam tahap awal implementasi model. Kolaborasi ini akan menciptakan hubungan timbal balik antara dunia akademik dan praktik lapangan.

Keenam, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi nasional terhadap praktik partisipatif di industri sawit yang terstandarisasi namun fleksibel terhadap konteks lokal. Kementerian/Lembaga dapat membentuk sistem pemantauan berbasis indikator partisipasi generasi muda, keterbukaan informasi, dan dampak sosial-lingkungan. Hasil evaluasi ini harus dipublikasikan secara berkala dan menjadi acuan dalam penilaian ISPO atau penyaluran insentif keberlanjutan. Transparansi hasil evaluasi akan mendorong persaingan sehat antarwilayah dalam memperbaiki tata kelola sawit. Sistem ini juga akan memberi umpan balik yang kuat terhadap efektivitas kebijakan afirmatif.

Rekomendasi-rekomendasi ini menekankan bahwa pelibatan generasi muda dalam industri sawit bukan hanya soal moral partisipatif, melainkan kebutuhan strategis dalam transformasi sektor ini menuju keberlanjutan. Dengan dukungan kebijakan yang adaptif, inklusif, dan

berbasis data, model manajemen partisipatif yang dirancang dapat diimplementasikan secara nasional. Pemerintah, industri, dan masyarakat sipil perlu mengambil peran aktif untuk menjamin bahwa ruang partisipasi benar-benar tersedia dan didukung. Langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan model ini dalam kebijakan pembangunan daerah dan nasional secara bertahap. Subbab berikut akan mengusulkan strategi peningkatan kapasitas sebagai upaya mendukung keberlanjutan partisipasi jangka panjang.

5.4 Strategi Peningkatan Kapasitas Generasi Muda

Peningkatan kapasitas generasi muda merupakan elemen kunci dalam mengubah partisipasi pasif menjadi keterlibatan yang transformatif dalam industri kelapa sawit. Kapasitas yang dimaksud tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga pengetahuan kebijakan, kepemimpinan sosial, dan kemampuan berorganisasi. Strategi peningkatan kapasitas harus dirancang secara sistematis, kontekstual, dan berkelanjutan agar dapat menjawab kebutuhan serta hambatan partisipasi pemuda di berbagai wilayah. Berdasarkan temuan lapangan, sebagian besar pemuda memiliki kemauan tinggi untuk belajar, tetapi tidak memiliki akses terhadap pelatihan atau mentor. Oleh karena itu, pendekatan pelatihan harus bersifat inklusif dan didesain sesuai karakteristik lokal.

Strategi pertama adalah pengembangan kurikulum pelatihan berbasis praktik, yang meliputi teknik budidaya sawit berkelanjutan, manajemen koperasi, kewirausahaan sosial, dan penggunaan teknologi digital di pertanian.

Pelatihan ini perlu dilakukan secara modular, terstruktur, dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan peserta. Model pelatihan bisa mengadopsi sistem blended learning, yang menggabungkan pertemuan tatap muka dan platform daring untuk menjangkau wilayah terpencil. Kerja sama dengan perguruan tinggi, politeknik, dan balai penyuluhan pertanian akan memperkuat kualitas modul. Selain materi teknis, pelatihan juga harus membahas nilai-nilai keberlanjutan, etika agribisnis, dan advokasi kebijakan desa.

Strategi kedua adalah penguatan struktur kelembagaan pemuda, seperti kelompok tani muda, koperasi pemuda, atau forum desa berbasis sawit lestari. Organisasi ini menjadi wadah pengembangan kapasitas kolektif yang mendorong kepemimpinan lokal dan keberlanjutan jangka panjang. Pemerintah desa dan pihak swasta dapat berperan sebagai fasilitator awal dalam proses pembentukan dan konsolidasi kelompok. Dukungan teknis dalam hal administrasi, perencanaan kegiatan, dan akses pembiayaan harus diberikan secara intensif. Penguatan organisasi juga dapat dilakukan melalui peer learning antardesa dan studi banding ke wilayah yang telah berhasil mengimplementasikan model partisipatif.

Strategi ketiga adalah penciptaan jaringan pendamping dan mentor lintas sektor, yang terdiri dari akademisi, praktisi industri, aktivis LSM, dan tokoh lokal. Kehadiran mentor sangat penting untuk memberi bimbingan teknis, motivasi, serta membuka akses terhadap peluang usaha atau beasiswa. Pendampingan ini sebaiknya

berbasis relasi jangka panjang, tidak hanya bersifat proyek sementara. Platform digital seperti aplikasi mentoring atau grup diskusi daring dapat memperkuat jangkauan dan kontinuitas hubungan. Kualitas pendampingan akan menentukan percepatan proses belajar dan tumbuhnya kepercayaan diri generasi muda.

Strategi keempat adalah fasilitasi akses terhadap sumber daya produksi dan pembiayaan, agar kapasitas yang telah dimiliki dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata. Banyak pemuda tidak memiliki lahan, modal, atau legalitas usaha, sehingga pelatihan saja tidak cukup. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu menciptakan skema khusus bagi pemuda, seperti kredit pertanian hijau, hibah inkubasi usaha, atau program sewa lahan berbasis komunitas. Sektor swasta juga dapat memberikan akses terhadap bahan baku, pasar, dan teknologi melalui kemitraan strategis. Ketika sumber daya tersedia, kapasitas yang telah dibangun akan berkembang menjadi inisiatif nyata yang produktif.

Strategi kelima adalah pembentukan pusat inovasi dan pelatihan pemuda sawit lestari di tingkat kabupaten atau provinsi. Pusat ini dapat menjadi lokasi pembelajaran kolektif, tempat uji coba teknologi, dan pusat diseminasi informasi keberlanjutan. Kegiatan rutin seperti workshop, lomba inovasi, dan pameran hasil karya pemuda dapat meningkatkan semangat kolaborasi dan membangun jejaring baru. Pusat ini juga dapat berperan sebagai inkubator kewirausahaan sosial yang berorientasi pada transformasi industri sawit dari akar rumput. Kolaborasi

antarinstansi sangat diperlukan untuk keberlanjutan dan replikasi pusat ini ke wilayah lain.

Akhirnya, strategi peningkatan kapasitas generasi muda harus dipantau dan dievaluasi secara berkala dengan indikator yang relevan. Evaluasi tidak hanya mengukur kuantitas peserta pelatihan, tetapi juga perubahan perilaku, pertumbuhan usaha, dan pengaruh sosial yang dihasilkan oleh para alumni. Monitoring ini harus dilakukan secara partisipatif dan menjadi dasar untuk menyempurnakan kurikulum serta strategi pendampingan. Dengan proses yang adaptif, strategi peningkatan kapasitas akan mampu menjawab dinamika industri dan kebutuhan generasi muda di masa depan. Keberhasilan program kapasitas akan menjadi fondasi dari keberlanjutan partisipasi generasi muda dalam industri sawit.

5.5 Rencana Implementasi Jangka Pendek dan Panjang

Implementasi model manajemen partisipatif pada generasi muda dalam industri kelapa sawit membutuhkan perencanaan bertahap yang realistis dan terukur. Strategi pelaksanaan dibagi menjadi dua fase utama: jangka pendek (1-2 tahun) dan jangka panjang (3-5 tahun atau lebih). Fase jangka pendek fokus pada pembentukan fondasi kelembagaan, peningkatan kapasitas awal, serta uji coba model di beberapa wilayah percontohan. Fase jangka panjang diarahkan untuk replikasi model, penguatan sistem kolaborasi lintas sektor, dan integrasi ke dalam kebijakan daerah dan nasional. Dengan pendekatan bertahap ini,

proses transisi dari partisipasi simbolik ke partisipasi transformatif dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Pada fase jangka pendek, langkah awal adalah melakukan identifikasi wilayah prioritas berdasarkan kesiapan komunitas, dukungan kelembagaan, dan potensi partisipasi generasi muda. Wilayah-wilayah tersebut dipilih sebagai lokasi pilot project dengan pendekatan uji coba terbatas namun terstruktur. Selanjutnya, dibentuk tim pelaksana lokal yang terdiri dari pemerintah desa, perwakilan pemuda, perusahaan, dan LSM pendamping. Tim ini bertugas menyusun rencana aksi partisipatif, melaksanakan pelatihan awal, serta membentuk forum dan kelembagaan pemuda. Fase ini juga melibatkan pengumpulan data dasar sebagai bahan evaluasi awal efektivitas model.

Selama fase awal, diperlukan penyusunan dan penyebaran modul pelatihan partisipatif serta panduan teknis pelaksanaan model. Materi ini meliputi tata kelola partisipatif, kewirausahaan sawit berkelanjutan, advokasi kebijakan desa, dan pengembangan organisasi pemuda. Modul dikembangkan secara kolaboratif oleh akademisi, praktisi lapangan, dan organisasi pemuda itu sendiri untuk memastikan relevansi kontekstual. Selain itu, dilakukan pelatihan pelatih (training of trainers) agar tersedia tenaga fasilitator lokal yang mampu mengelola proses secara mandiri. Hal ini akan memastikan keberlanjutan pembelajaran tanpa ketergantungan eksternal.

Pada tahun kedua, difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan uji efektivitas model dalam pengambilan keputusan komunitas dan tata kelola industri. Evaluasi awal dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemuda mulai terlibat dalam proses perencanaan desa, forum kemitraan, dan kegiatan kewirausahaan lokal. Jika hasil menunjukkan peningkatan partisipasi dan kepemilikan, model dapat diperluas ke wilayah lain dengan penyesuaian lokal. Pengembangan platform digital partisipasi juga dapat dimulai untuk mendukung komunikasi antarwilayah dan dokumentasi kegiatan. Tahun kedua menjadi masa konsolidasi dan refleksi sebelum memasuki fase perluasan.

Pada fase jangka panjang, fokus beralih ke replikasi model di tingkat kabupaten dan provinsi dengan dukungan pemerintah daerah. Hal ini mencakup integrasi model ke dalam RPJMD, Peraturan Desa atau Bupati, serta pelibatan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaksanaan. Perlu dibentuk pusat koordinasi multipihak untuk mengelola ekspansi model dan menjaga kualitas implementasi. Kolaborasi dengan sektor swasta diperluas melalui perjanjian kerja sama jangka menengah yang menjamin kontribusi sumber daya dan fasilitasi program CSR. Dengan demikian, model ini tidak hanya menjadi program lokal, tetapi bagian dari kebijakan pembangunan wilayah.

Fase jangka panjang juga menekankan pada penguatan sistem monitoring dan evaluasi partisipatif yang

melibatkan pemuda sebagai evaluator dan pengambil keputusan. Instrumen evaluasi dikembangkan bersama untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas antaraktor. Data dari proses evaluasi digunakan sebagai dasar pembaruan kebijakan, penyusunan laporan publik, dan bahan advokasi nasional. Dengan sistem evaluasi yang berjalan baik, program tidak akan kehilangan arah dan tetap responsif terhadap dinamika lapangan. Mekanisme ini juga penting untuk memastikan bahwa partisipasi tetap menjadi proses yang bermakna dan produktif.

Rencana implementasi jangka pendek dan panjang yang dirancang dalam Penulisan buku ini merupakan bagian integral dari upaya mentransformasi industri kelapa sawit melalui keterlibatan generasi muda. Dengan pendekatan bertahap, partisipatif, dan kontekstual, model manajemen partisipatif dapat tumbuh sebagai kerangka kerja berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional. Kesuksesan implementasi akan bergantung pada komitmen politik, dukungan kebijakan, serta sinergi antaraktor. Bab ini ditutup dengan usulan strategi replikasi dan pembelajaran lintas wilayah sebagai bagian dari penguatan kelembagaan jangka panjang. Langkah ini menjadi jembatan menuju reformasi tata kelola industri yang lebih inklusif dan adil.

5.6 Strategi Replikasi dan Pembelajaran Lintas Wilayah

Replikasi model manajemen partisipatif ke wilayah lain memerlukan strategi yang tidak sekadar menyalin bentuk, tetapi menyesuaikan substansi dengan karakteristik sosial, budaya, dan kelembagaan setempat. Pendekatan

yang digunakan adalah adaptive scaling, yaitu perluasan dengan memperhatikan dinamika lokal dan kapasitas komunitas. Dengan strategi ini, proses replikasi lebih bersifat transformatif ketimbang mekanis. Prinsip dasarnya adalah “belajar sambil meluas,” di mana setiap wilayah baru menjadi laboratorium kontekstual dari pengembangan model. Hal ini penting untuk menghindari kegagalan akibat penerapan model secara seragam di wilayah yang berbeda secara struktural.

Langkah awal dalam strategi replikasi adalah mengembangkan profil wilayah, yang mencakup peta sosial, sumber daya komunitas, aktor lokal, serta sejarah hubungan antara masyarakat dan industri sawit. Informasi ini menjadi dasar dalam menentukan pendekatan fasilitasi, pilihan mitra strategis, serta desain kelembagaan yang sesuai. Selain itu, penting untuk melibatkan pemuda lokal sejak awal sebagai mitra dalam perencanaan, bukan hanya sebagai peserta. Pendekatan ini memastikan bahwa model benar-benar dimiliki oleh komunitas setempat. Keberhasilan replikasi sangat bergantung pada kualitas dialog awal dan kesesuaian pendekatan dengan kebutuhan lokal.

Strategi kedua adalah membentuk jejaring desa belajar atau komunitas praktik antarwilayah, di mana desa-desa yang telah menerapkan model dapat berbagi pengalaman, tantangan, dan inovasi. Jejaring ini berfungsi sebagai platform pertukaran pengetahuan horizontal, yang terbukti lebih efektif dibanding transfer pengetahuan

vertikal dari pemerintah ke desa. Desa yang lebih dulu sukses bisa menjadi mentor bagi desa yang baru mulai, melalui program studi banding, kunjungan lapangan, atau forum virtual. Jejaring ini juga dapat memperkuat solidaritas antarpemuda dan mempercepat proses adopsi inovasi. Dengan cara ini, replikasi berjalan dengan prinsip kesetaraan dan pembelajaran bersama.

Strategi ketiga adalah penguatan peran pusat-pusat pelatihan dan riset lokal dalam mendampingi replikasi. Universitas daerah, balai penyuluhan, atau lembaga pelatihan masyarakat dapat bertindak sebagai pusat akreditasi fasilitator, penyedia modul, dan evaluator eksternal. Kolaborasi ini penting untuk menjaga kualitas implementasi serta memperbarui pendekatan sesuai dengan hasil evaluasi. Institusi pendidikan juga dapat menjadi simpul penghubung antara inovasi akademik dan praktik lapangan. Melalui mekanisme ini, replikasi tidak hanya memperluas jangkauan, tetapi juga memperdalam kualitas dan ketahanan model.

Dalam proses replikasi, perlu disediakan mekanisme pendanaan fleksibel dan kompetitif yang memungkinkan komunitas lokal mengakses sumber daya tanpa birokrasi berlebihan. Pemerintah daerah dan donor internasional dapat menyediakan skema insentif berbasis kinerja atau challenge fund bagi desa atau organisasi pemuda yang berhasil menjalankan model dengan baik. Pendanaan ini sebaiknya disertai dengan dukungan teknis dan pelatihan manajemen keuangan agar dana digunakan secara efisien

dan akuntabel. Dengan insentif yang adil dan berbasis hasil, motivasi partisipasi dan inovasi akan semakin tinggi. Pendekatan ini menciptakan kombinasi antara tanggung jawab dan penghargaan.

Strategi pembelajaran lintas wilayah juga harus mencakup sistem dokumentasi dan diseminasi pengetahuan berbasis digital dan terbuka. Platform daring seperti portal komunitas sawit lestari atau kanal media sosial dapat digunakan untuk menyimpan praktik baik, modul pelatihan, dan video pengalaman pemuda. Dokumentasi ini tidak hanya menjadi bahan pembelajaran internal, tetapi juga alat advokasi kepada pembuat kebijakan dan mitra internasional. Transparansi proses dan hasil replikasi akan memperkuat legitimasi model di mata publik dan mendorong perluasan dukungan. Komunitas pemuda juga dapat didorong menjadi produsen narasi perubahan, bukan hanya objek dari dokumentasi luar.

Secara keseluruhan, strategi replikasi dan pembelajaran lintas wilayah tidak hanya bertujuan memperluas jangkauan model, tetapi juga membangun ekosistem pengetahuan dan kolaborasi antaraktor di tingkat akar rumput. Dengan pendekatan berbasis komunitas, fleksibilitas lokal, dan sistem pembelajaran berkelanjutan, model partisipatif ini berpeluang besar menjadi kerangka reformasi sosial dalam tata kelola industri sawit. Proses replikasi yang cerdas dan terstruktur akan memperkuat ketahanan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan generasi dalam sektor agribisnis. Bab ini sekaligus menutup

keseluruhan isi buku dengan menekankan bahwa transformasi industri sawit hanya akan tercapai jika generasi muda diberi ruang, alat, dan kepercayaan untuk terlibat aktif. Model manajemen partisipatif ini adalah salah satu jalan untuk mencapainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A., & Gibson, C. C. (1999). Enchantment and disenchantment: The role of community in natural resource conservation. *World Development*, 27(4), 629-649. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(98\)00161-2](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(98)00161-2)
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Colchester, M., & Chao, S. (Eds.). (2013). *Conflict or consent? The oil palm sector at a crossroads*. Forest Peoples Programme.
- Cornwall, A., & Jewkes, R. (1995). What is participatory research? *Social Science & Medicine*, 41(12), 1667-1676. [https://doi.org/10.1016/0277-9536\(95\)00127-S](https://doi.org/10.1016/0277-9536(95)00127-S)
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action: Reason and the rationalization of society* (Vol. 1). Beacon Press.
- Jelsma, I., Giller, K. E., & Fairhurst, T. (2017). Smallholder oil palm plantations in Indonesia: An overview of farmer profiles, production and profitability.

Wageningen University & Research.
<https://doi.org/10.18174/441132>

Kellert, S. R., Mehta, J. N., Ebbin, S. A., & Lichtenfeld, L. L. (2000). Community natural resource management: Promise, rhetoric, and reality. *Society & Natural Resources*, 13(8), 705-715.
<https://doi.org/10.1080/089419200750035575>

Kristiansen, S., Pratiwi, A., & Daryanto, A. (2021). Young farmers and agriculture: Insights from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 86, 104-114.
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.06.009>

Larson, A. M., Barry, D., & Dahal, G. R. (2016). *Forest tenure reform: New resource rights for forest-based communities?* Routledge.

Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, 325(5939), 419-422.
<https://doi.org/10.1126/science.1172133>

Parsons, T. (1951). *The social system*. Free Press.

Pretty, J. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247-1263.
[https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00046-F](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F)

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. In Worchel, S., & Austin, W. G. (Eds.), *Psychology of intergroup relations* (pp. 7-24). Nelson-Hall.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). *SAGE handbook of mixed methods in social & behavioral research* (2nd ed.). SAGE Publications.

PROFIL PENULIS I



Delyana R. Pulungan lahir di Medan, 28 April 1984, Ia tercatat sebagai lulusan Universitas Sumatera Utara (USU) di bidang Ilmu Manajemen. Wanita yang kerap dipanggil Ana ini adalah Dosen di Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) pada prodi

Agribisnis. Fokus Tridharma (pengajaran, Hasil dan pengabdian) di bidang SDM dan pemasaran. Saat ini mulai tertarik untuk menekuni keilmuan di bidang manajemen dan kewirausahaan di bidang perkebunan. Berbagai karya tulis ilmiah sudah dihasilkannya selama 8 tahun masa pengabdianya sebagai tenaga pengajar (dosen) sejak tahun 2015.

Karya publikasi yang telah diterbitkan dalam 3 tahun terakhir berupa buku chapter diantaranya adalah (1) Perencanaan Sumber Daya Manusia (2) Metodologi Riset Pemasaran (3) Kepemimpinan Bisnis (4) Penilaian Hasil Sumber Daya Manusia (5) Manajemen Strategik dan Kepemimpinan. Penulis juga aktif dalam berbagai kelibatan dan forum anggota FMI (Forum Manajemen Indonesia) sejak tahun 2019 hingga saat ini. E-mail: delpulungan@itsi.ac.id

PROFIL PENULIS II



Dina Arfianti Saragih, lahir di Tebing Tinggi tanggal 27 November 1986. Ia tercatat sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di bidang Manajemen Agribisnis. Wanita ini kerap dipanggil dengan nama Dina juga merupakan Dosen di Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI). Fokus Tridharma (pengajaran, penelitian dan pengabdian) di bidang Agribisnis, manajemen perkebunan dan kewirausahaan. Berbagai karya tulis ilmiah sudah dihasilkannya selama 7 tahun masa pengabdiannya sebagai tenaga pengajar (dosen) sejak tahun 2016. Karya tulis ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan bersama Yerlira Turnip yaitu mahasiswi dari Institut Teknologi Sawit Indonesia pada tahun 2021.

MODEL MANAJEMEN PARTISIPATIF PADA GENERASI MUDA DALAM Mendukung

SUSTAINABILITY INDUSTRI KELAPA SAWIT

Buku ini menyajikan sebuah model manajemen partisipatif yang dirancang khusus untuk mendorong keterlibatan generasi muda dalam mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia. Dengan pendekatan multidisipliner dan berbasis data empiris dari berbagai wilayah sentra sawit seperti aceh dan sumatera utara, buku ini mengungkap rendahnya partisipasi generasi muda dalam proses strategis industri, serta merumuskan solusi konseptual dan praktis untuk mengatasinya. Melalui sintesis teori partisipasi sosial, kapabilitas, dan sistem sosial-ekologis, penulis mengembangkan model yang terdiri dari tiga komponen utama: penguatan kapasitas pemuda, penciptaan ruang partisipatif, dan dukungan kelembagaan multipihak. Model ini tidak hanya diuji secara teoritis, tetapi juga divalidasi melalui simulasi lapangan dan studi kasus lokal yang memperlihatkan dampaknya terhadap keterlibatan pemuda, penguatan ekonomi komunitas, dan pengelolaan lingkungan. Buku ini ditujukan bagi akademisi, praktisi pembangunan, pembuat kebijakan, dan pelaku industri yang berkomitmen membangun sistem tata kelola sawit yang lebih inklusif dan berkeadilan antargenerasi. Disertai dengan strategi implementasi jangka pendek dan panjang, indikator evaluasi, serta rekomendasi kebijakan yang aplikatif, buku ini menjadi kontribusi penting dalam mendorong regenerasi dan reformasi sektor agribisnis nasional. Di tengah tantangan krisis lingkungan dan transformasi industri, keterlibatan generasi muda adalah kunci keberlanjutan.



IKAPI



YAYASAN
PENELITI PRIMA
INDONESIA



DIREKTORAT JEMBERAL KEAJAIBAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



Penerbit
PT. Radja Intercontinental Publishing
Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk,
Dsn. Angsana, Kota Lhokseumawe

www.radjapublika.org
<https://radjapustaka.com>

ISBN 978-634-7495-00-6 (PDF)



9

786347

495006